

# ***Pedoman Teknis***

## **DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TEKNIS LAINNYA PADA DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA TAHUN 2018**



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA  
Jl. AUP No. 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520**



**DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2017**

# *Pedoman Teknis*

## **DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TEKNIK LAINNYA PADA DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA TAHUN 2018**



**DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**

**KEMENTERIAN PERTANIAN**

**2017**



## KATA PENGANTAR



Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018 merupakan penjelasan umum yang disusun sebagai acuan bagi pelaksana kegiatan di Pusat maupun di daerah (Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota) dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Hortikultura khususnya yang terkait dengan tugas dan fungsi kesekretariatan.

Petunjuk teknis ini berisi penjelasan terkait pelaksanaan kegiatan dengan output berupa: Layanan Dukungan Manajemen Eselon I, Layanan Perkantoran, dan Layanan Internal (Overhead). Selanjutnya petunjuk ini perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam petunjuk yang lebih operasional di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota agar kegiatan yang akan dilaksanakan di lapang menjadi lebih jelas dan mudah diimplementasikan namun tetap merujuk pada kaidah aturan yang terdapat pada Petunjuk Teknis ini.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen Teknis Lainnya Pada Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018 diharapkan dapat memberikan panduan dan rambu-rambu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pengembangan hortikultura sesuai dengan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Jakarta, Desember 2017  
Direktur Jenderal Hortikultura

**Dr. Spudnik Sujono K, MM**  
NIP. 19580206 198503 1001



## DAFTAR ISI

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR.....                                         | i   |
| DAFTAR ISI .....                                            | iii |
| <b>LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON I (1774.950)</b> ..... | v   |
| BAB I    PENDAHULUAN.....                                   | 1   |
| A. LATAR BELAKANG.....                                      | 1   |
| B. TUJUAN DAN SASARAN .....                                 | 3   |
| BAB II    PELAKSANAAN .....                                 | 4   |
| A. Pelaksanaan di Pusat .....                               | 18  |
| B. Pelaksanaan di Provinsi.....                             | 24  |
| C. Pelaksanaan Di Kabupaten/ Kota .....                     | 29  |
| BAB III    INDIKATOR KINERJA .....                          | 32  |
| A. MASUKAN/ <i>INPUT</i> .....                              | 32  |
| B. KELUARAN/ <i>OUTPUT</i> .....                            | 32  |
| C. HASIL/ <i>OUTCOME</i> .....                              | 32  |
| D. MANFAAT/ <i>BENEFIT</i> .....                            | 32  |
| E. DAMPAK/ <i>IMPACT</i> .....                              | 32  |
| <b>LAYANAN PERKANTORAN (1774.994)</b> .....                 | 63  |
| BAB I    PENDAHULUAN.....                                   | 65  |
| A. LATAR BELAKANG.....                                      | 65  |
| B. TUJUAN DAN SASARAN .....                                 | 66  |
| BAB II    PELAKSANAAN .....                                 | 67  |
| A. PELAKSANAAN DI PUSAT .....                               | 67  |
| B. PELAKSANAAN DI PROVINSI .....                            | 69  |
| C. PELAKSANAAN DI KABUPATEN .....                           | 71  |
| BAB III    INDIKATOR KINERJA .....                          | 74  |
| A. MASUKAN/ <i>INPUT</i> .....                              | 74  |
| B. KELUARAN/ <i>OUTPUT</i> .....                            | 74  |
| C. HASIL/ <i>OUTCOME</i> .....                              | 74  |
| D. MANFAAT/ <i>BENEFIT</i> .....                            | 74  |
| E. DAMPAK/ <i>IMPACT</i> .....                              | 74  |

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| <b>LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD) (1774.951)</b> ..... | 95  |
| <b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b> .....               | 97  |
| A. LATAR BELAKANG.....                              | 97  |
| B. TUJUAN DAN SASARAN .....                         | 98  |
| <b>BAB II</b> <b>PELAKSANAAN</b> .....              | 99  |
| A. PELAKSANAAN DI PUSAT.....                        | 99  |
| <b>BAB III</b> <b>INDIKATOR KINERJA</b> .....       | 101 |
| A. MASUKAN/ <i>INPUT</i> .....                      | 101 |
| B. KELUARAN/ <i>OUTPUT</i> .....                    | 101 |
| C. HASIL/ <i>OUTCOME</i> .....                      | 101 |
| D. MANFAAT/ <i>BENEFIT</i> .....                    | 101 |
| E. DAMPAK/ <i>IMPACT</i> .....                      | 101 |



**LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON I  
(1774.950)**



## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Kegiatan manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Berdasarkan Permentan No. 43 Tahun 2015, Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura memiliki tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura. Sedangkan fungsinya menyelenggarakan koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran, serta kerjasama di bidang hortikultura, pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan, mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan serta pemberian layanan rekomendasi di bidang hortikultura, pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Hortikultura.

Dalam melakukan kegiatan perencanaan dan penyusunan dokumen pelaksanaan untuk kegiatan tahun berikutnya perlu memperhatikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan.

Adapun kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura adalah Peningkatan usaha dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen Hortikultura. Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura, sebagai unit eselon II memberikan dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lain Direktorat Jenderal Hortikultura. Kegiatan ini dilakukan tidak hanya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal, lebih dari itu untuk mewujudkan tata kelola pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Reformasi birokrasi yang mengarah pada pelaksanaan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mengharuskan adanya penyesuaian manajemen pelaksanaan. Penyesuaian manajemen pelaksanaan dapat dilakukan pada semua aspek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Sebagai salah satu unsur penting dalam sistem manajemen pembangunan, penyesuaian mekanisme

perencanaan pembangunan dilakukan secara terpadu antara *top-down policy* dan *bottom-up planning*, dengan mendorong partisipasi masyarakat sebesar-besarnya.

Dalam proses perencanaan berdasarkan prinsip keterpaduan *bottom up planning* dan *top down policy*, rancangan kegiatan pengembangan Hortikultura disusun secara bertahap mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat. Memperhatikan mekanisme perencanaan agar dapat terpadu, berkelanjutan, dan memahami bahwa penyesuaian manajemen mempunyai implikasi terhadap kualitas pelaksanaan pengembangan hortikultura, maka diperlukan suatu perencanaan strategis yang dapat memberikan arah untuk lima tahun ke depan.

Selain melakukan perencanaan, salah satu tugas dan fungsi penting institusi pemerintah sebagai pelaksana dan pengelola anggaran wajib menyusun dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta pengelolaan penggunaan anggaran secara tertib dan berjenjang. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang terkait pengelolaan laporan kementerian/lembaga antara lain: 1) Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, 2) Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, 3) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor:171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Laporan evaluasi kinerja dalam rangka pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan peningkatan kualitas, 7) PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan adanya restrukturisasi program dan kegiatan sebagai wujud pelaksanaan anggaran berbasis kinerja beberapa tahun belakangan ini makin mewajibkan bagi setiap unit kerja untuk menetapkan indikator kinerja, merencanakan program/kegiatan, melaksanakan dan mengevaluasi capaian kinerja untuk dituangkan dan disusun dalam suatu laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

Oleh karena itu, dalam rangka penyusunan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan hortikultura yang akurat dan informatif, diperlukan data/informasi yang memadai, dan disesuaikan dengan perkembangan pelaksanaan kegiatan, baik yang sedang berjalan, maupun yang telah selesai pelaksanaannya, serta proyeksi berdasarkan hasil pemantauan. Lebih lanjut, laporan yang akurat, *up to date* dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik merupakan esensi dari fungsi pelaporan.

## **B. TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan adalah memberikan petunjuk pemanfaatan dan pengelolaan dana kegiatan layanan dukungan manajemen pada Direktorat Jenderal Hortikultura .

Sasaran kegiatan adalah terlaksananya penataan dan pengelolaan dokumen perencanaan, hukum, kehumasan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan hortikultura serta terselenggaranya pelayanan di bidang rekomendasi dan perizinan yang akuntabel, tertib, teratur, efektif, dan efisien.

## BAB II PELAKSANAAN

Adapun kegiatan layanan dukungan manajemen pada Direktorat Jenderal Hortikultura meliputi kegiatan :

### **(051) Menyusun Dokumen Perencanaan**

Penyusunan dokumen perencanaan dilakukan untuk memberi arahan dalam upaya mencapai tujuan yang diharapkan.

Adapun beberapa kegiatan penyusunan dokumen perencanaan diantaranya :

#### **1. Penataan dan pengelolaan program pengembangan hortikultura**

Beberapa dokumen perencanaan terkait penataan dan pengelolaan program pengembangan hortikultura mencakup :

- Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai pedoman penyusunan RAPBN. RKP memuat program dan kegiatan bersifat terukur (*measurable*), dan dapat dilaksanakan (*workable*). RKP disusun dengan pendekatan penerapan KPJM, penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja.

Dasar hukum penyusunan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL). Dokumen RKP berkaitan dengan dokumen kesepakatan pada *Trilateral Meeting* antara Bappenas, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Keuangan.

- Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dasar hukum penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah Direktorat Jenderal Hortikultura adalah Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan RKT Direktorat Jenderal Hortikultura dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran yang akan dicapai pada tahun berjalan oleh Eselon I dan Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura yang disusun setiap tahunnya.

Penyusunan RKT meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan utama, indikator kinerja sasaran/ indikator kinerja utama (IKU), dan target yang ingin dicapai dalam satu tahun.

- Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Hortikultura merupakan dokumen perjanjian kinerja pejabat yang berwenang mulai dari pejabat Eselon I yang selanjutnya dilakukan pendelegasian kinerja hingga level Eselon IV. Dokumen tersebut memuat target kinerja selama 5 (lima) tahunan.
- Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan

sumber daya yang dimiliki oleh unit eselon I,II, III, IV dan satuan kerja di daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara PAN & RB No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, masing-masing unit kerja kementerian/lembaga diharuskan untuk menyusun Perjanjian Kinerja.

PK disusun oleh oleh pemangku jabatan struktural (Eselon I, II, III, dan IV) lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura. Selain itu, satuan kerja yang mendapat alokasi anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura baik dekonsentrasi, tugas pembantuan provinsi, maupun tugas pembantuan Kabupaten/Kota mandiri diharuskan membuat Perjanjian Kinerja (PK) antara pejabat daerah berwenang (Kepala Dinas Pertanian) dengan Direktur Jenderal Hortikultura. Dokumen PK disusun setelah turunnya DIPA tahun anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja juga harus disusun apabila terdapat perubahan alokasi anggaran dan/ atau perubahan target output kinerja.

- Rencana Strategis Pengembangan Hortikultura

Dokumen Rencana strategis pengembangan hortikultura merupakan dokumen yang berorientasi pada hasil atau sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategik dalam skala nasional dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala/ permasalahan dan tantangan yang dihadapi serta memuat visi dan misi Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai penjabaran kebijakan sasaran dan prioritas sasaran pengembangan hortikultura selama periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura disusun mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2015 – 2019 sesuai amanat Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019.

- Petunjuk Umum dan Petunjuk Teknis

Petunjuk umum merupakan acuan dan panduan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan hortikultura secara general dalam satu tahun. Petunjuk umum disusun dalam rangka pengelolaan anggaran kinerja subsektor hortikultura dan untuk menselaraskan antara rancangan program dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan per tahun.

Petunjuk teknis disusun untuk memberikan acuan, kerangka kerja, petunjuk dan tolak ukur bagi pelaksanaan kegiatan pengembangan hortikultura yang berbasis kinerja. Tujuan yang diharapkan dari tersedianya dokumen petunjuk teknis adalah untuk meningkatkan pemahaman bagi pelaksana kegiatan dan meningkatkan efisiensi, efektivitas, ketertiban dan transparansi serta tanggungjawab bagi pelaksana kegiatan sehingga memudahkan pelaporan dan evaluasi kinerja pelaksanaan pengembangan sub sektor hortikultura.

## 2. Penataan dan pengelolaan kerjasama bidang hortikultura

Beberapa dokumen perencanaan terkait penataan dan pengelolaan kerjasama bidang hortikultura mencakup :

- Kerjasama Bilateral
  - a. Sidang bilateral Indonesia – Belanda dalam kerangka *Working Group on Agriculture, Forestry and Fisheries*.
  - b. Sidang bilateral Indonesia – Australia di bawah kerangka *Working Group on Agriculture, Food and Forestry Cooperation (WGAFF)*
  - c. Sidang bilateral Indonesia – New Zealand dibawah kerangka *Agribusiness Working Group (AWG)*.
  - d. Sidang bilateral Indonesia – Singapore di bawah kerangka *Agribusiness Working Group (AWG)*.
  - e. Sidang Bilateral Indonesia – Filipina di bawah kerangka *Joint Agriculture Working Group (JAWG)*

- f. Sidang Bilateral Indonesia – India di bawah kerangka *Joint Working Group on Agriculture (JWG)*
  - g. Sidang Bilateral Indonesia – Jepang
  - h. Sidang Bilateral Indonesia – Taiwan dibawah kerangka *Consultation Meeting on Agriculture IETO-TETO*
  - i. Sidang Bilateral Indonesia dengan negara lainnya yang memiliki *Memorandum of Understanding* antara kedua negara dimaksud.
- Kerjasama Regional
    - a. Sidang *ASEAN Sectoral Working Group on Crop (ASWGC)*
    - b. Sidang *Expert Working Group on Harmonization of Minimum Residue Limits of Pesticides (EWG-MRLs)*
    - c. Sidang *Expert Working Group on ASEAN Good Agricultural Practices (EWG-GAP)*
    - d. Sidang *ASEAN Expert Working Group on Harmonization of Phytosanitary Measures (EWG-PS)*
    - e. Sidang *ASEAN on Organic Agriculture (EWG-OA)*
    - f. Sidang *Task Force on ASEAN Standards for Horticultural Produce and Other Food Crops (MASHP)*,
    - g. Sidang *Prepatory Senior Official Meeting on ASEAN Ministry of Agriculture, and Forestry (PrepSOM AMAF)*
    - h. Sidang *Special Senior Official Meeting on ASEAN Ministry of Agriculture, and Forestry (SpecSOM AMAF)*
    - i. Sidang *ASEAN Ministry of Agriculture, and Forestry (AMAF)*
  - Kerjasama Multilateral

Kerjasama multilateral adalah hubungan internasional yang menunjukkan kerja sama antara beberapa *negara-negara* di dunia maupun antara *negara* dengan lembaga internasional. Kerjasama multilateral yang telah dilakukan oleh Kementerian Pertanian dengan lembaga internasional antara lain adalah FAO dan WTO. Pinjaman / Hibah Luar negeri.

Pada Tahun 2018, Direktorat Jenderal Hortikultura memiliki kegiatan pengembangan hortikultura melalui dana hibah luar negeri yang merupakan proyek kerjasama dengan *Jepang International Cooperation Agency* (JICA). Kegiatan proyek dimaksud telah memasuki pelaksanaan kegiatan proyek tahun kedua.

Kegiatan proyek PPP ini melibatkan 8 (delapan) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Bogor dan Kota Sukabumi. Kegiatan juga melibatkan Sub Terminal Agribisnis yang terdapat di Kabupaten/Kota tersebut. Kegiatan Proyek PPP pada tahun 2018 dan selanjutnya harus mengikuti skema perencanaan yang telah dibuat oleh JICA dan disepakati oleh Direktorat Jenderal Hortikultura dan petani/pelaksana proyek di 8 kabupaten/kota dimaksud.

Proyek ini merupakan suatu kerjasama / kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha untuk perbaikan system distribusi dan pemasaran produk – produk pertanian. Tujuan dari proyek ini adalah memperbaiki system produksi dan distribusi produk – produk pertanian modern yang aman dan bermutu yang mengarah pada peningkatan pendapatan petani dan dikembangkan di tempat-tempat yang menjadi lokasi kegiatan.

- Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan Gender (PUG) atau *gender mainstreaming* dalam Pembangunan Pertanian merupakan amanat dari INPRES Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Sebagai salah satu strategi dalam Pembangunan Nasional, PUG merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari UU Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan ratifikasi *Cinvention on the Elimination of all forms of Discrimination Againts Women (CEDW)* dan sekaligus merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang ingin dicapai dalam tujuan pembangunan millennium (*Millenium Development Goals/MDGs*).

- Direktorat Jenderal Hortikultura pada tahun 2018 menetapkan pengembangan kawasan cabai dimana salah satunya terdapat pengadaan benih cabai dalam polybag yang diwacanakan sebagai kegiatan yang mengakomodir PUG. Pertemuan Kerjasama Antar Lembaga.

*Joint Coordination Committee (JCC) Meeting*

Dalam rangka peningkatan koordinasi, monitoring dan pelaporan capaian pelaksanaan kegiatan proyek *The Public Private Partnership Project (PPP) for Improvement of Agriculture Product, Marketing and Distribution System* yang dilaksanakan oleh JICA dan Direktorat Jenderal Hortikultura, maka setiap tahunnya dilakukan Pertemuan Joint Coordination Committee (JCC) yang melibatkan pihak JICA, Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, Direktorat Jenderal Hortikultura, Biro Kerjasama Luar Negeri, Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan proyek serta kelompok tani dan petugas lapang yang terkait didalamnya.

Pertemuan ini dilakukan untuk meningkatkan efektifitas kegiatan serta mencapai output yang maksimal. Hasil dari pertemuan ini akan menjadi dasar pertimbangan dan persiapan perencanaan kerja ke depan bagi Tim Konsultan JICA dalam melakukan pendampingan dan penyusunan konsep sistem distribusi dan pemasaran produk hortikultura yang tepat di lokasi-lokasi proyek.

### 3. Penataan dan pengelolaan dokumen anggaran pengembangan hortikultura

Beberapa dokumen perencanaan terkait penataan dan pengelolaan anggaran pengembangan hortikultura mencakup :

- **Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL)** merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran.

Penganggaran secara strategis dalam RKA-KL perlu dibatasi dengan pagu realistis, agar tekanan pengeluaran/pembelanjaan tidak mengganggu pencapaian tujuan fiskal, sehingga penyusunan RKA-KL oleh Kementerian Negara/ Lembaga dilaksanakan setelah menerima Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Sementara Kementerian Negara/Lembaga yang merupakan pagu anggaran yang didasarkan atas kebijakan umum dan prioritas anggaran hasil pembahasan Pemerintah Pusat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pagu Sementara tersebut merupakan batas tertinggi alokasi anggaran yang dirinci menurut program dan terdiri atas pagu rupiah murni, PHLN, dan PNPB. Selanjutnya untuk menentukan pagu definitif harus melalui tahapan penelaahan RKA-KL untuk meneliti kesesuaian antara RKA-KL hasil pembahasan Kementerian Negara/Lembaga dan DPR yang kemudian dilanjutkan meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Definitif untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang ditetapkan dalam UU APBN.

- **Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)** adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Penyusunan dan pengesahan DIPA diatur dalam PMK NOMOR 164 /PMK.05/2011.
- **Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)** adalah dokumen yang memuat uraian rencana kerja dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai penjabaran lebih lanjut dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

#### **(052) Penyusunan Dokumen Hukum, Kehumasan dan Kepegawaian**

Penyusunan dokumen hukum, kehumasan dan kepegawaian serta ketatausahaan dan kearsipan. dilakukan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan manajemen yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi yang efisien dan tepat sasaran.

Kegiatan hukum dan kehumasan memprioritaskan pada pelayanan untuk penyiapan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, dan pelaksanaan hubungan masyarakat, serta informasi publik, dan urusan kepustakaan. Kegiatan Organisasi dan kepegawaian memprioritaskan pada kegiatan penyiapan bahan evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi serta pelaksanaan urusan penataan, pengelolaan, peningkatan mutu dan sosialisasi kepegawaian. Kegiatan Tata Usaha dan Rumah Tangga melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

### **(053) Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan laporan keuangan dilakukan dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, Menteri/ Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Hortikultura mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Pusat, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Tujuan dari penyusunan laporan keuangan ini agar dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Jenderal Hortikultura. Disamping itu, laporan keuangan dapat dijadikan tolak ukur kinerja dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga dapat menggambarkan suatu instansi serta memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Adapun ruang lingkup pelaporan keuangan Direktorat Jenderal Hortikultura terdiri dari :

- Laporan SAIBA dan SIMAK BMN
- Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- Laporan Kerugian Negara dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Itjen, BPK dan BPKP)

#### **(054) Penyusunan Laporan Evaluasi dan Layanan Rekomendasi**

Penyusunan Laporan Evaluasi dan Layanan Rekomendasi dilakukan dalam rangka menyediakan informasi atas progress atau perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan hortikultura baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, capaian kinerja pembangunan hortikultura, laporan data statistik, penerbitan rekomendasi impor produk hortikultura dan perizinan benih hortikultura yang bermanfaat bagi sejumlah *stakeholders* maupun Pimpinan sebagai bahan acuan maupun pertimbangan dalam pengambilan keputusan/kebijakan pembangunan hortikultura di masa mendatang.

Secara rinci macam kegiatan, jenis laporan beserta landasan hukum terkait pelaporan evaluasi dan layanan rekomendasi dijelaskan sebagai berikut:

##### **1. Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pelaporan**

Laporan hasil pemantauan dan evaluasi merupakan hasil keluaran dari pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ke lokasi pengembangan hortikultura di daerah. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mengacu pada dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan yang mengamanatkan kepada Pimpinan Kementerian/ Lembaga untuk melakukan pemantauan pelaksanaan Renja-KL, kepada Gubernur untuk melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta kepada Bupati/Walikota untuk melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan

sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya, setelah melakukan pemantauan dan evaluasi maka pelaksana kegiatan wajib menyusun laporan yang berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan metode kunjungan lapang, kunjungan kerja, koordinasi, wawancara, serta melakukan pengkajian terhadap laporan dan hasil pelaksanaan. Kajian dan analisis dilakukan terhadap perkembangan kegiatan, capaian pemanfaatan dana dan fisik kegiatan, manfaat dan dampak, permasalahan serta kendala yang dihadapi. Hasil pemantauan dan evaluasi akan disajikan dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Dinas Pertanian di provinsi dan kabupaten/kota pelaksana pengembangan hortikultura juga diminta melakukan pemantauan dan evaluasi ke daerah binaannya, serta menyampaikan laporannya. Pembinaan dan bimbingan teknis pada lokasi pengembangan komoditas hortikultura juga dapat dilakukan seiring dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi di lapangan.

Selanjutnya, mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L, maka semua pelaksanaan kegiatan dengan pendanaan bersumber dari APBN wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART).

Pelaporan monev kinerja wajib dilakukan secara mandiri oleh petugas pelaporan di Pusat dan Daerah, melalui dukungan fasilitasi dari Kementerian Keuangan berupa aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) yang dapat diakses melalui website [monev.anggaran.depkeu.go.id](http://monev.anggaran.depkeu.go.id).

Laporan yang diisikan pada aplikasi SMART adalah capaian realisasi output pada bulan bersangkutan saja, dan bukan merupakan rekapitulasi capaian output. Realisasi fisik kegiatan termasuk progres

tahapan dalam pelaksanaan *output* harus dilaporkan secara rutin setiap bulan selama satu tahun anggaran dalam upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas untuk menuju “*good governance*”.

## 2. Penyusunan dan Pengelolaan Data Statistik Hortikultura

Penyusunan dan pengelolaan data statistik hortikultura dilakukan melalui sistem pelaporan berjenjang, dimana KCD/Mantri Tani/PPL di tingkat kecamatan menyampaikan laporan pengumpulan data statistik ke tingkat kabupaten. Selanjutnya, petugas data di tingkat kabupaten wajib memeriksa kelengkapan data dan kebenaran isi laporan, serta membuat rekapitulasi Statistik Pertanian Hortikultura (SPH) menjadi Rekapitulasi Kabupaten Statistik Pertanian Hortikultura (RKSPH). Untuk kemudian dokumen RKSPH dikoordinasikan dengan BPS Kabupaten/Kota dan dikirimkan ke Dinas Pertanian Provinsi. Dimana, laporan Rekapitulasi Provinsi Statistik Pertanian Hortikultura (RPSPH) dari Dinas Pertanian Provinsi akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Hortikultura melalui email ke alamat [datinhorti@gmail.com](mailto:datinhorti@gmail.com) atau dengan surat yang ditujukan kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura c.q Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi, Jl. AUP No.3 Pasar Minggu Jakarta Selatan, 12520.

Jenis laporan statistik hortikultura yang wajib disusun adalah sebagai berikut:

- a. SPH-SBS adalah laporan tanaman sayuran dan buah-buahan semusim.
- b. SPH-BST adalah laporan tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan.
- c. SPH-TBF adalah laporan tanaman biofarmaka,
- d. SPH-TH adalah laporan tanaman hias,
- e. SPH-BN adalah laporan perbenihan hortikultura.

Laporan RPSPH-SBS merupakan laporan bulanan yang dikirim setiap bulan paling lambat tanggal 20 setelah bulan bersangkutan berakhir untuk Pulau Jawa sedangkan luar Pulau Jawa setiap

tanggal 25 setelah bulan bersangkutan berakhir. Sedangkan Laporan RPSPH-BST, TBF dan TH merupakan laporan triwulanan yang dikirim paling lambat tanggal 20 setelah triwulan bersangkutan berakhir untuk Pulau Jawa, sedangkan untuk luar Pulau Jawa setiap tanggal 25 setelah triwulan bersangkutan berakhir.

Pengelolaan statistik hortikultura tersebut berlandaskan kepada dasar hukum sebagai berikut; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura, serta Naskah Kesepakatan bersama Nomor 443/TU-010/A/5/06 Tahun 2006 antara Departemen Pertanian dengan Badan Pusat Statistik tentang pelaksanaan Kegiatan *Data Entry* SP (Survey pertanian) melalui Formulir SP Elektronik.

Disamping itu, sebagai bentuk perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan, maka terdapat satu kewajiban pelaporan lainnya yang tidak kalah pentingnya untuk dibuat dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik pada tahun anggaran berjalan. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pasal 2 dan Pasal 3 bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan melalui penyusunan Laporan Kinerja yang wajib dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan Entitas Akuntabilitas Kinerja; 1) Satuan Kinerja, 2) Unit Organisasi dan 3) Kementerian Negara/Lembaga. Selanjutnya, penyusunan laporan kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehingga, berdasarkan pada dasar hukum tersebut diatas, maka setiap instansi atau institusi negara yang mengelola keuangan negara memiliki kewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja dalam pemanfaatan keuangan diakhir tahun pelaksanaan kegiatan secara berjenjang mulai dari Eselon II kepada Eselon I, Eselon I kepada Menteri dan Menteri kepada Presiden melalui Kementerian PAN dan RB. Disamping itu, pengguna atau pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Satuan Kerja di daerah juga wajib melaporkan akuntabilitas kinerja kepada pemberi anggarannya dalam hal ini adalah Unit Kerja Eselon I diatasnya.

Adapun, sebelum penyusunan Laporan Kinerja terdapat suatu dokumen perencanaan yang wajib dibuat oleh pelaksana kegiatan di daerah yaitu Dokumen Perjanjian Kinerja yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Format penyusunan Perjanjian Kinerja mengacu pada Lampiran I PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Untuk selanjutnya, penyusunan Laporan kinerja dapat mengacu pada format laporan yang terdapat pada Lampiran II PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014.

Penyusunan Laporan Kinerja wajib dilaksanakan pada tahun berjalan, sedangkan penyampaiannya untuk Laporan Kinerja Eselon I dikirimkan kepada Menteri Pertanian paling lambat tanggal 15 Februari tahun berikutnya, Laporan Kinerja Eselon II dan Laporan Kinerja Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura dikirimkan kepada Direktur Jenderal Hortikultura paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

### **3. Pengelolaan Layanan Rekomendasi dan Perizinan**

Pelayanan pemberian rekomendasi produk hortikultura (RIPH) mengacu pada Permentan Nomor 38/Permentan/HR.060/11/2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura

dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Selanjutnya RIPH digunakan untuk pengajuan Surat Persetujuan Impor (SPI) di Kementerian Perdagangan. Pelayanan pemberian surat izin pemasukan dan pengeluaran benih hortikultura mengacu pada Permentan Nomor 15/Permentan/HR.060/5/2017 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura.

## A. Pelaksanaan di Pusat

### 1. Lokasi

Kegiatan layanan dukungan manajemen eselon I dilaksanakan di Direktorat Jenderal Hortikultura.

### 2. Output/ Sub Output/ Komponen Kegiatan

Output : (950) Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

Indikator Output : (01) Jumlah Dokumen Perencanaan, Hukum, Kehumasan dan Kepegawaian

(02) Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Hortikultura

Sub output : **(001) Tanpa Sub Output**

Komponen : (051) Menyusun dokumen perencanaan,  
(052) Menyusun dokumen hukum, kehumasan dan kepegawaian,  
(053) Menyusun laporan keuangan  
(054) Menyusun laporan evaluasi dan layanan rekomendasi

### 3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura. Penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini adalah pegawai lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura.

### 4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada DIPA Satker Direktorat Jenderal Hortikultura.

### 5. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan layanan dukungan manajemen Eselon I di pusat dilakukan melalui :

**(051) Menyusun Dokumen Perencanaan**

Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan di pusat terdiri dari : Koordinasi dan Pengumpulan Data, penyusunan dokumen perencanaan, pertemuan/ sosialisasi/ sinkronisasi/ workshop, pembinaan/ pendampingan/ bimbingan teknis.

- 1) Koordinasi dan pengumpulan data dalam rangka mendukung kegiatan Penataan dan pengelolaan kerjasama bidang pengembangan hortikultura dan Penataan dan pengelolaan program pengembangan hortikultura. Koordinasi dan pengumpulan data dilakukan dengan akun belanja (521811) belanja barang untuk persediaan barang konsumsi, (522151) Belanja Jasa Profesi, (524111) belanja perjalanan biasa, (524114) belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota, (524119) belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota.
- 2) Penyusunan Dokumen Perencanaan dalam rangka mendukung kegiatan Penataan dan pengelolaan dokumen kerjasama hortikultura, Penataan dan pengelolaan program pengembangan hortikultura, serta penataan dan pengelolaan dokumen anggaran pengembangan hortikultura. Penyusunan dokumen perencanaan dilakukan dengan akun belanja (521114) Belanja pengiriman surat dinas pos pusat, (521811) Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi, (522151) Belanja Jasa Profesi, (524111) belanja perjalanan biasa, (524119) Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota, (524219) Belanja perjalanan lainnya-luar negeri - untuk menghadiri pertemuan internasional.
- 3) Pertemuan/sosialisasi/sinkronisasi/workshop dalam rangka mendukung kegiatan Penataan dan pengelolaan dokumen kerjasama hortikultura dan Penataan dan pengelolaan program pengembangan hortikultura, serta penataan dan pengelolaan dokumen anggaran pengembangan hortikultura.  
 Pertemuan/ Sosialisasi/ Sinkronisasi/ Workshop dilakukan dengan akun belanja (521211) Belanja bahan, (521213) honor output kegiatan, (521811) Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi, (522141) Belanja sewa, (522151) Belanja jasa profesi, (524111) belanja perjalanan biasa, (524119) Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota.

- 4) Pembinaan/ pendampingan/ bimbingan teknis dalam rangka mendukung kegiatan Penataan dan pengelolaan dokumen kerjasama hortikultura dan Penataan dan pengelolaan dokumen anggaran pengembangan hortikultura.

Pembinaan/ pendampingan/ bimbingan teknis dilakukan dengan akun belanja (522151) Belanja jasa profesi, (524111) belanja perjalanan biasa, (524119) Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota.

Penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan melalui :

1. Penataan dan Pengelolaan Dokumen Kerjasama Hortikultura, meliputi :
  - Koordinasi, pembinaan, identifikasi, konsultasi, pengumpulan data penataan dan pengelolaan kerjasama hortikultura,
  - Penyusunan Bahan Posisi Indonesia pada sidang internasional (ASWGC, TF-MASHP, ASEAN-GAP, ASEAN,
  - Pertemuan kerjasama antar lembaga
  - Menghadiri pertemuan internasional terkait kerjasama di bidang hortikultura
  - Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dalam rangka kerjasama bidang hortikultura
2. Penataan dan Pengelolaan Program Pengembangan Hortikultura, meliputi :
  - Koordinasi, Konsultasi dan Review Indikator dan Kinerja Program dan Kegiatan Pengembangan Hortikultura.
  - koordinasi, identifikasi, pengumpulan data dan informasi rancangan program pengembangan hortikultura
  - identifikasi dan sinkronisasi target program dan kegiatan pengembangan hortikultura jangka menengah.
  - Koordinasi dan Konsultasi Pengembangan Hortikultura, Penyusunan Petunjuk Umum dan Petunjuk Teknis Pengembangan Hortikultura.

- Sinkronisasi Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura 2018.
  - Sinkronisasi pelaksanaan dan rancangan kegiatan pengembangan hortikultura dan kawasan tematik hortikultura.
3. Penataan dan Pengelolaan Dokumen Anggaran Pengembangan Hortikultura, meliputi :
- Datasering Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2018 dan Rancangan Pengembangan Hortikultura 2019.
  - Koordinasi dan Pendampingan Pelaksanaan Anggaran 2018 dan Rancangan 2019.
  - Koordinasi Penyusunan Rancangan RKA-KL Subsektor Horti 2019.
  - Workshop Pemantapan RKA-KL 2019.
  - Koordinasi Penelaahan Dokumen Anggaran 2018 dan Perencanaan Tahun 2019.
  - Bimbingan Teknis dan Pendampingan Penyusunan Dokumen Anggaran Tahun 2019.
  - Perjalanan pembinaan penyusunan dokumen Anggaran TA.2019.
  - Reviu dokumen anggaran 2018, penyusunan rancangan dokumen anggaran 2019.

#### **(052) Menyusun Dokumen Hukum, Kehumasan dan Kepegawaian**

Kegiatan penyusunan dokumen hukum, kehumasan dan kepegawaian di pusat terdiri dari : penyusunan dokumen hukum, kehumasan dan kepegawaian, pertemuan/ sosialisasi/ sinkronisasi/ workshop, pembinaan/ pendampingan/ bimbingan teknis.

- 1) Penyusunan dokumen hukum, kehumasan dan kepegawaian dilakukan dengan akun belanja (521211) Belanja bahan, (522151)

Belanja Jasa Profesi, (524111) Belanja Perjalanan biasa, (524119) Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota.

- 2) Pertemuan/ sosialisasi/ sinkronisasi/ workshop dilakukan dengan akun belanja (521211) Belanja bahan, (522151) Belanja Jasa Profesi.
- 3) Pembinaan/ pendampingan/ bimbingan teknis dilakukan dengan akun belanja (521211) Belanja bahan, (521213) Honor output kegiatan, (522151) Belanja Jasa Profesi.

Penyusunan dokumen hukum, kehumasan dan kepegawaian dilaksanakan melalui kegiatan penataan dan pengelolaan kepegawaian lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura yang meliputi penyusunan dokumen kepegawaian, koordinasi/konsultasi penataan kepegawaian, pertemuan, sosialisasi dan rapat koordinasi tata laksana dan organisasi, sosialisasi peraturan kepegawaian, organisasi dan jabatan fungsional tertentu bagi seluruh pegawai, konsolidasi internal pelaksana tugas dan fungsi dan peningkatan kapabilitas pegawai.

### **(053) Menyusun Laporan Keuangan**

Kegiatan penyusunan laporan keuangan di pusat terdiri dari : koordinasi dan pengumpulan data, pembinaan/ pendampingan/ bimbingan teknis, dan Sinkronisasi/ Sosialisasi/ Apresiasi/ Koordinasi/ Workshop, Penyusunan laporan keuangan.

- 1) Koordinasi dan Pengumpulan Data dilakukan dengan akun belanja (524111) Belanja perjalanan biasa, (524113) Belanja perjalanan dinas dalam kota, (524114) Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota, (524119) Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota.
- 2) Pembinaan/ Pendampingan / Bimbingan Teknis dilakukan dengan akun belanja (521811) Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi, (524111) Belanja perjalanan biasa.
- 3) Sinkronisasi/ Sosialisasi/ Apresiasi/ Koordinasi/ Workshop dilakukan dengan akun belanja (521211) Belanja bahan, (521213) Honor output kegiatan, (522141) Belanja sewa, (522151) Belanja Jasa Profesi, (524111) Belanja perjalanan biasa, (524119) Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota.

- 4) Penyusunan Laporan Keuangan dilakukan dengan akun belanja (521211) Belanja bahan, (521213) Honor output kegiatan, (521811) Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi, (522121) Belanja Jasa Pos dan Giro, (524111) Belanja perjalanan biasa.

Penyusunan laporan keuangan dilaksanakan meliputi kegiatan koordinasi pelaksanaan anggaran, rapat keuangan dan perlengkapan (SAI, SAK, SIMAK BMN, Perbendaharaan), penyusunan bahan laporan SIMAK BMN, penyusunan bahan inventarisasi barang milik negara, penyelesaian tindak lanjut penertiban aset BMN, pembinaan laporan SAIBA, Workshop penyusunan Laporan tahunan SAIBA dan SIMAK BMN satker lingkup Ditjen Hortikultura, Monitoring target dan realisasi PNBPN, dan penyusunan laporan kerugian negara.

#### **(054) Menyusun Laporan Evaluasi dan Layanan Rekomendasi**

Kegiatan penyusunan laporan evaluasi dan layanan rekomendasi di pusat terdiri dari : Koordinasi dan pengumpulan data, Pembinaan/ pendampingan/ bimbingan teknis pelaporan dan evaluasi pengembangan hortikultura, Pertemuan/ Sosialisasi/ Sinkronisasi/ Workshop Evaluasi Pengembangan Hortikultura, Penyusunan laporan hasil evaluasi dan rekomendasi

- 1) Koordinasi dan pengumpulan data dilakukan dengan akun belanja (521811) Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi, (524111) Belanja Perjalanan biasa, (534131) Belanja modal jaringan.
- 2) Pembinaan/ pendampingan/ bimbingan teknis pelaporan dan evaluasi pengembangan hortikultura dilakukan dengan akun belanja (521811) Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi, (524111) Belanja perjalanan biasa, dan (524119) Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota.
- 3) Pertemuan/Sosialisasi/Sinkronisasi/Workshop Evaluasi Pengembangan Hortikultura dilakukan dengan akun belanja (521211) Belanja bahan, (521213) Honor output kegiatan, (521811) Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi, (522151) Belanja Jasa Profesi, (524111) Belanja perjalanan biasa, (524114) Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota, dan (524119) Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota.

- 4) Penyusunan laporan hasil evaluasi dan rekomendasi dilakukan dengan akun belanja (521114) Belanja pengiriman surat dinas pos pusat, (521211) Belanja bahan, (521213) Honor output kegiatan, (521811) Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi, (522141) Belanja sewa, (522151) Belanja jasa profesi, (523121) Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin, (524111) Belanja perjalanan biasa, (524113) Belanja perjalanan dinas dalam kota, (524114) Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota, dan (524119) Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota.

Adapun, kegiatan penyusunan Laporan Evaluasi dan Layanan Rekomendasi di Pusat dilakukan melalui Penyusunan Bahan Sinkronisasi Angka Hortikultura Tahun 2017, Pertemuan Sinkronisasi Angka Hortikultura Tahun 2017 (ASEM), Penyusunan Angka Tetap Hortikultura Tahun 2017, Rapat Koordinasi Pengelolaan Data Hortikultura, Penyempurnaan Jaringan Internat dalam rangka mendukung pelaporan evaluasi pengembangan hortikultura dan pengelolaan data statistik hortikultura, Apresiasi SAKIP Tahun 2018, Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018, Reviu Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018 serta Pertemuan/koordinasi pembahasan Rekomendasi Impor Mendukung Penerbitan RIPH Tahun 2018.

## B. Pelaksanaan di Provinsi

### 1. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan pada satker **dinas pertanian provinsi** di 34 provinsi untuk dekonsentrasi dan 33 satker provinsi untuk tugas pembantuan provinsi di Indonesia. Adapun lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat pada Lampiran 1.

### 2. Output/ Sub Output/ Komponen Kegiatan

|            |                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Output     | : (950) Layanan Dukungan Manajemen Eselon I                             |
| Sub output | : <b>(001) Tanpa Sub Output</b>                                         |
| Komponen   | : (051) Menyusun dokumen perencanaan<br>(053) Menyusun Laporan Keuangan |

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat
  - a. Pelaksana kegiatan Anggaran Dekonsentrasi di Provinsi melalui :

**(051) Menyusun dokumen perencanaan**

Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis hortikultura dan/atau bagian yang menangani perencanaan dan/atau evaluasi Dinas Pertanian Provinsi. Penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi. Sedangkan penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini adalah karyawan lingkup teknis dan/atau administrasi (perencanaan, data dan pelaporan) yang membidangi hortikultura di tingkat provinsi.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan untuk mendukung kegiatan pengembangan hortikultura di Provinsi.

**(052) Menyusun laporan keuangan**

Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis hortikultura dan/atau bagian yang menangani perencanaan dan/atau evaluasi Dinas Pertanian Provinsi. Penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi, sedangkan penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini adalah karyawan lingkup teknis dan/atau administrasi (perencanaan, data dan pelaporan) yang membidangi hortikultura di tingkat provinsi.

- b. Pelaksana kegiatan Anggaran Tugas pembantuan di Provinsi melalui :

**(051) Menyusun dokumen perencanaan**

Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis hortikultura dan/atau bagian yang menangani perencanaan dan/atau evaluasi Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendapat alokasi Tugas Pembantuan Provinsi terkait. Penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi. Sedangkan penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini adalah karyawan lingkup teknis dan/atau administrasi (perencanaan, data dan pelaporan) yang membidangi hortikultura di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendapat alokasi Tugas Pembantuan Provinsi terkait.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan untuk mendukung perencanaan dan kegiatan pengembangan hortikultura di Kabupaten/ Kota yang mendapat alokasi Tugas Pembantuan di Provinsi.

#### **(052) Menyusun laporan keuangan**

Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis hortikultura dan/atau bagian yang menangani perencanaan dan/atau evaluasi Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendapat alokasi Tugas Pembantuan Provinsi terkait. Penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi, sedangkan penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini adalah karyawan lingkup teknis dan/atau administrasi (perencanaan, data dan pelaporan) yang membidangi hortikultura di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendapat alokasi Tugas Pembantuan Provinsi terkait.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan keuangan dilaksanakan untuk mendukung kegiatan pelaporan, monitoring, dan evaluasi pengembangan hortikultura di Kabupaten/ Kota yang mendapat alokasi Tugas Pembantuan di Provinsi.

#### **4. Pembiayaan**

Kegiatan ini dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada DIPA Tahun Anggaran 2018 Satker Dinas Pertanian Provinsi yang membidangi hortikultura.

#### **5. Metode**

### **(950) Layanan Dukungan Manajemen Eselon I**

- Metode pelaksanaan kegiatan Layanan dukungan manajemen Eselon I dana Dekonsentrasi di provinsi dilakukan melalui :

#### **(051) Menyusun Dokumen Perencanaan**

Penyusunan dokumen perencanaan dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan teknis pengembangan komoditas hortikultura yang mencakup sub kegiatan koordinasi dan pengumpulan data perencanaan, penyusunan dokumen perencanaan, pertemuan/

sosialisasi/ sinkronisasi/ workshop, monitoring dan evaluasi pengembangan hortikultura dana dekonsentrasi di Provinsi.

Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan tersebut dilakukan dengan akun belanja (521211) Belanja Bahan, (521213) Honor Output Kegiatan, (521811) Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi, (522151) Belanja Jasa Profesi, (524111) Belanja perjalanan biasa, (524114) Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota atau (524119) belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota.

Penyusunan dokumen perencanaan meliputi pengumpulan data perencanaan pengembangan hortikultura, konsultasi dan penyusunan dokumen program pengembangan hortikultura (masterplan, perjanjian kinerja, dokumen keuangan, RKA-KL, POK, dll), menghadiri dan/atau melaksanakan pertemuan penyusunan perencanaan (Sinkronisasi Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura 2018 dan Rancangan Kegiatan Pengembangan Hortikultura 2019, penyusunan RKAKL TA 2019).

### **(053) Menyusun Laporan Keuangan**

Penyusunan laporan keuangan di Provinsi terdiri dari Koordinasi dan pengumpulan data, Pertemuan/ sosialisasi/ sinkronisasi/ workshop, Penyusunan Laporan pengelolaan keuangan dana dekonsentrasi di Provinsi.

Kegiatan penyusunan laporan keuangan tersebut dilakukan dengan akun belanja (521211) Belanja Bahan, (521213) Honor Output Kegiatan, (521811) Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi, (522151) Belanja Jasa Profesi, (524111) Belanja perjalanan biasa, (524114) Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota atau (524119) belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota.

Penyusunan laporan keuangan meliputi kegiatan administratif dan pengumpulan data statistik hortikultura, konsultasi/ koordinasi data dan pelaporan dari Provinsi ke Pusat, dan Penyusunan Laporan Tahunan SAIBA dan SIMAK BMN, Pembekalan pengelola keuangan dan perlengkapan Satker Direktorat Jenderal Hortikultura), Sinkronisasi angka sementara, dan penyusunan laporan pemantauan pelaksanaan kegiatan hortikultura dan evaluasi pengelolaan keuangan dana APBN di

Provinsi. Kegiatan pelaporan keuangan dilakukan secara kontinu setiap triwulan, semester, dan tahunan ke Direktorat Jenderal Hortikultura.

- Metode pelaksanaan kegiatan Layanan dukungan manajemen Eselon I dana Tugas Pembantuan di provinsi dilakukan melalui :

#### **(051) Menyusun Dokumen Perencanaan**

Penyusunan dokumen perencanaan dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan teknis pengembangan komoditas hortikultura yang mencakup sub kegiatan koordinasi dan pengumpulan data perencanaan, penyusunan dokumen perencanaan, pertemuan/ sosialisasi/ sinkronisasi/ workshop, monitoring dan evaluasi pengembangan hortikultura dana tugas pembantuan di Provinsi.

Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan tersebut dilakukan dengan akun belanja (521211) Belanja Bahan, (521811) Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi, (524111) Belanja perjalanan biasa, (524114) Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota atau (524119) belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota.

Penyusunan dokumen perencanaan meliputi pengumpulan data, konsultasi dan koordinasi dari Kabupaten/Kota ke Provinsi dan/atau ke Pusat, dan penyusunan dokumen perencanaan pengembangan hortikultura (*actionplan*, perjanjian kinerja, dokumen keuangan, RKA-KL, POK, dll), pembinaan dari provinsi ke Kabupaten/Kota Tugas Pembantuan Provinsi.

#### **(053) Menyusun Laporan Keuangan**

Penyusunan laporan keuangan di Provinsi terdiri dari Koordinasi dan pengumpulan data, Pertemuan/ sosialisasi/ sinkronisasi/ workshop, Penyusunan Laporan pengelolaan keuangan dana tugas pembantuan di Provinsi.

Kegiatan penyusunan laporan keuangan tersebut dilakukan dengan akun belanja (521211) Belanja Bahan, (521213) Honor Output Kegiatan, (521811) Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi, (522151) Belanja Jasa Profesi, (524111) Belanja perjalanan biasa, (524114) Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota atau (524119) belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota.

Penyusunan laporan keuangan meliputi kegiatan administratif dan pengumpulan data statistik hortikultura, konsultasi/ koordinasi data dan pelaporan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi dan/atau ke Pusat, monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan pemantauan pelaksanaan kegiatan hortikultura dan evaluasi pengelolaan keuangan dana APBN Tugas Pembantuan di Provinsi. Kegiatan pelaporan keuangan dilakukan secara kontinu setiap triwulan, semester, dan tahunan ke Direktorat Jenderal Hortikultura.

### C. Pelaksanaan Di Kabupaten/ Kota

#### 1. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan pada satker **dinas pertanian kabupaten/ kota di 36 kabupaten/ kota**.

#### 2. Output/ Sub Output/ Komponen Kegiatan

Output : (950) Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

Sub output : **(001) Tanpa Sub Output**

Komponen : (051) Menyusun dokumen perencanaan  
(053) Menyusun Laporan Keuangan

#### 3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

##### **(051) Menyusun dokumen perencanaan**

Pelaksana kegiatan penyusunan dokumen perencanaan adalah bidang teknis hortikultura dan/atau bagian yang menangani perencanaan dan/atau evaluasi Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang mendapat alokasi dana Tugas Pembantuan. Penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota. Sedangkan Penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini adalah karyawan lingkup teknis dan/atau administrasi (perencanaan, data dan pelaporan) yang membidangi hortikultura di Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota terkait.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan untuk mendukung perencanaan dan kegiatan pengembangan hortikultura di Kabupaten/ Kota yang mendapat alokasi Dana Tugas Pembantuan.

### **(052) Menyusun laporan keuangan**

Pelaksana kegiatan penyusunan laporan keuangan adalah bidang teknis hortikultura dan/atau bagian yang menangani perencanaan dan/atau evaluasi atau pelaporan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang mendapat alokasi Tugas Pembantuan. Penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota, sedangkan penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini adalah karyawan lingkup teknis dan/atau administrasi (perencanaan, data dan pelaporan) yang membidangi hortikultura di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendapat alokasi Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan keuangan dilaksanakan untuk mendukung kegiatan pelaporan, monitoring, dan evaluasi pengembangan hortikultura di Kabupaten/ Kota yang mendapat alokasi Tugas Pembantuan.

#### **4. Pembiayaan**

Kegiatan ini dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada DIPA Tahun Anggaran 2018 Satker Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota yang membidangi hortikultura.

#### **5. Metode**

Metode pelaksanaan kegiatan layanan dukungan manajemen Eselon I dalam pengembangan Hortikultura di Dinas Pertanian kabupaten/ kota dilakukan melalui :

### **(051) Menyusun Dokumen Perencanaan**

Penyusunan dokumen perencanaan dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan teknis pengembangan komoditas hortikultura yang mencakup sub kegiatan koordinasi dan pengumpulan data perencanaan, penyusunan dokumen perencanaan, pertemuan/ sosialisasi/ sinkronisasi/ workshop, pendampingan/ pembinaan, monitoring dan evaluasi pengembangan hortikultura dana tugas pembantuan di Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan tersebut dilakukan dengan akun belanja (521211) Belanja Bahan, (521811) Belanja barang

untuk persediaan barang konsumsi, (524111) Belanja perjalanan biasa, (524114) Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota atau (524119) belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota.

Penyusunan dokumen perencanaan meliputi pengumpulan data, konsultasi dan koordinasi dari Kabupaten/Kota ke Provinsi dan/atau ke Pusat, dan penyusunan dokumen perencanaan pengembangan hortikultura (*actionplan*, perjanjian kinerja, dokumen keuangan, RKA-KL, POK, dll), pendampingan/ pembinaan kegiatan dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

### **(053) Menyusun Laporan Keuangan**

Penyusunan laporan keuangan di Kabupaten/ Kota terdiri dari Koordinasi dan pengumpulan data, Pertemuan/ sosialisasi/ sinkronisasi/ workshop, Penyusunan Laporan pengelolaan keuangan dana tugas pembantuan Kabupaten/ Kota.

Kegiatan penyusunan laporan keuangan tersebut dilakukan dengan akun belanja (521211) Belanja Bahan, (521213) Honor Output Kegiatan, (521811) Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi, (522151) Belanja Jasa Profesi, (524111) Belanja perjalanan biasa, (524114) Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota atau (524119) belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota.

Penyusunan laporan keuangan meliputi kegiatan administratif dan pengumpulan data statistik hortikultura, konsultasi/ koordinasi data dan pelaporan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi dan/atau ke Pusat, monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan pemantauan pelaksanaan kegiatan hortikultura dan evaluasi pengelolaan keuangan dana APBN Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota. Kegiatan pelaporan keuangan dilakukan secara kontinu setiap triwulan, semester, dan tahunan ke Direktorat Jenderal Hortikultura.

## **BAB III**

### **INDIKATOR KINERJA**

#### **A. MASUKAN/ INPUT**

1. Dana Rp 42.743.766.000,-
2. Sumber Daya Manusia (petugas)
3. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Tahun 2018
4. Rancangan anggaran dan kegiatan per satker sub sektor hortikultura baik pusat maupun daerah.

#### **B. KELUARAN/ OUTPUT**

Tersedianya layanan dukungan manajemen eselon I kegiatan pengembangan hortikultura pada satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura selama 1 tahun anggaran.

#### **C. HASIL/ OUTCOME**

Terciptanya layanan dukungan manajemen eselon I kegiatan pengembangan hortikultura yang efektif, efisien, tertib dan teratur.

#### **D. MANFAAT/ BENEFIT**

Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan sub sektor hortikultura dengan efektif, tertib dan lancar.

#### **E. DAMPAK/ IMPACT**

Meningkatnya kinerja dalam pelaksanaan program pengembangan sub sektor hortikultura.

**LAMPIRAN 1.**  
**LOKASI OUTPUT LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON I**  
**(1774.950)**

| NO. | LOKASI               |                      | OUTPUT                              | KOMPONEN                                                    | VOL | SATUAN  | ANGGARAN<br>(Ribu Rupiah) | Total<br>Anggaran<br>(Ribu<br>Rupiah) | Kewenangan    |
|-----|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 1   | Pusat                | Pusat                | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan dokumen hukum, kehumasan dan kepegawaian         | 1   | Dokumen | 3,500,000                 | 30,378,796                            | Pusat         |
|     |                      |                      | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan                                 | 1   | Laporan | 3,500,000                 |                                       |               |
|     |                      |                      | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan dokumen perencanaan                              | 1   | Dokumen | 3,500,000                 |                                       |               |
|     |                      |                      | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan evaluasi dan layanan rekomendasi         | 3   | Laporan | 19,260,968                |                                       |               |
|     |                      |                      | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Menyusun laporan pemantauan produksi cabai dan bawang merah | 3   | Laporan | 617,828                   |                                       |               |
| 2   | Provinsi DKI Jakarta | Provinsi DKI Jakarta | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan                                 | 1   | Laporan | 65,000                    | 65,000                                | Dekonsentrasi |
| 3   | Provinsi Jawa Barat  | Provinsi Jawa Barat  | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan                                 | 1   | Laporan | 240,000                   | 240,000                               | Dekonsentrasi |
|     |                      | Kab. Bogor           | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan                                 | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                      | Kab. Sukabumi        | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan                                 | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                      | Kab. Subang          | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan                                 | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                      | Kab. Tasikmalaya     | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan                                 | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |

| NO. | LOKASI                  |                          | OUTPUT                                       | KOMPONEN                       | VOL | SATUAN  | ANGGARAN<br>(Ribu Rupiah) | Total<br>Anggaran<br>(Ribu<br>Rupiah) | Kewenangan    |
|-----|-------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----|---------|---------------------------|---------------------------------------|---------------|
|     |                         | Kab. Ciamis              | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                         | Kab. Cirebon             | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                         | Kab.<br>Kuningan         | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                         | Kab.<br>Indramayu        | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                         | Kab.<br>Bandung<br>Barat | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                         | Kab.<br>Pangandaran      | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                         | Kota<br>Tasikmalaya      | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                         | Kab. Cianjur             | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 45,000                    | 45,000                                | TP Kab/Kota   |
|     |                         | Kab.<br>Bandung          | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 45,000                    | 45,000                                | TP Kab/Kota   |
|     |                         | Kab.<br>Sumedang         | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 45,000                    | 45,000                                | TP Kab/Kota   |
|     |                         | Kab. Garut               | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 45,000                    | 45,000                                | TP Kab/Kota   |
|     |                         | Kab.<br>Majalengka       | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 45,000                    | 45,000                                | TP Kab/Kota   |
| 4   | Provinsi Jawa<br>Tengah | Provinsi Jawa<br>Tengah  | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 265,000                   | 265,000                               | Dekonsentrasi |

| NO. | LOKASI |                 | OUTPUT                              | KOMPONEN                    | VOL | SATUAN  | ANGGARAN<br>(Ribu Rupiah) | Total<br>Anggaran<br>(Ribu<br>Rupiah) | Kewenangan |
|-----|--------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----|---------|---------------------------|---------------------------------------|------------|
|     |        | Kab. Semarang   | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop    |
|     |        | Kab. Kendal     | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop    |
|     |        | Kab. Demak      | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop    |
|     |        | Kab. Pekalongan | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop    |
|     |        | Kab. Tegal      | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop    |
|     |        | Kab. Brebes     | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop    |
|     |        | Kab. Pati       | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop    |
|     |        | Kab. Kudus      | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop    |
|     |        | Kab. Pemalang   | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop    |
|     |        | Kab. Jepara     | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop    |
|     |        | Kab. Rembang    | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop    |
|     |        | Kab. Blora      | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop    |
|     |        | Kab. Cilacap    | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop    |

| NO. | LOKASI |                   | OUTPUT                              | KOMPONEN                    | VOL | SATUAN  | ANGGARAN<br>(Ribu Rupiah) | Total<br>Anggaran<br>(Ribu<br>Rupiah) | Kewenangan  |
|-----|--------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----|---------|---------------------------|---------------------------------------|-------------|
|     |        | Kab. Purbalingga  | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop     |
|     |        | Kab. Banjarnegara | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop     |
|     |        | Kab. Wonosobo     | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop     |
|     |        | Kab. Purworejo    | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop     |
|     |        | Kab. Kebumen      | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop     |
|     |        | Kab. Klaten       | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop     |
|     |        | Kab. Boyolali     | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop     |
|     |        | Kab. Sragen       | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop     |
|     |        | Kab. Wonogiri     | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop     |
|     |        | Kab. Batang       | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 45,000                    | 45,000                                | TP Kab/Kota |
|     |        | Kab. Magelang     | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 45,000                    | 45,000                                | TP Kab/Kota |
|     |        | Kab. Temanggung   | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 45,000                    | 45,000                                | TP Kab/Kota |
|     |        | Kab. Karanganyar  | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 45,000                    | 45,000                                | TP Kab/Kota |

| NO. | LOKASI                 |                        | OUTPUT                              | KOMPONEN                    | VOL | SATUAN  | ANGGARAN<br>(Ribu Rupiah) | Total<br>Anggaran<br>(Ribu<br>Rupiah) | Kewenangan    |
|-----|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----|---------|---------------------------|---------------------------------------|---------------|
|     |                        | Kab. Grobogan          | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 45,000                    | 45,000                                | TP Kab/Kota   |
| 5   | Provinsi Di Yogyakarta | Provinsi Di Yogyakarta | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 95,000                    | 95,000                                | Dekonsentrasi |
|     |                        | Kab. Bantul            | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                        | Kab. Sleman            | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                        | Kab. Gunungkidul       | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                        | Kab. Kulonprogo        | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
| 6   | Provinsi Jawa Timur    | Provinsi Jawa Timur    | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 215,000                   | 215,000                               | Dekonsentrasi |
|     |                        | Kab. Gresik            | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                        | Kab. Mojokerto         | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                        | Kab. Pamekasan         | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                        | Kab. Sumenep           | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                        | Kab. Situbondo         | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                        | Kab. Jember            | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |

| NO. | LOKASI |                 | OUTPUT                              | KOMPONEN                    | VOL | SATUAN  | ANGGARAN<br>(Ribu Rupiah) | Total<br>Anggaran<br>(Ribu<br>Rupiah) | Kewenangan  |
|-----|--------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----|---------|---------------------------|---------------------------------------|-------------|
|     |        | Kab. Pasuruan   | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop     |
|     |        | Kab. Kediri     | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop     |
|     |        | Kab. Nganjuk    | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop     |
|     |        | Kab. Trenggalek | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop     |
|     |        | Kab. Blitar     | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop     |
|     |        | Kab. Magetan    | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop     |
|     |        | Kab. Ponorogo   | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop     |
|     |        | Kab. Pacitan    | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop     |
|     |        | Kab. Bojonegoro | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 20,000                    | 20,000                                | TP Prop     |
|     |        | Kab. Tuban      | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 20,000                    | 20,000                                | TP Prop     |
|     |        | Kab. Lamongan   | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 20,000                    | 20,000                                | TP Prop     |
|     |        | Kota Batu       | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 20,000                    | 20,000                                | TP Prop     |
|     |        | Kab. Bondowoso  | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 45,000                    | 45,000                                | TP Kab/Kota |

| NO. | LOKASI                                     |                                            | OUTPUT                                       | KOMPONEN                       | VOL | SATUAN  | ANGGARAN<br>(Ribu Rupiah) | Total<br>Anggaran<br>(Ribu<br>Rupiah) | Kewenangan    |
|-----|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----|---------|---------------------------|---------------------------------------|---------------|
|     |                                            | Kab. Malang                                | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 45,000                    | 45,000                                | TP Kab/Kota   |
|     |                                            | Kab.<br>Banyuwangi                         | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 45,000                    | 45,000                                | TP Kab/Kota   |
|     |                                            | Kab.<br>Probolinggo                        | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 45,000                    | 45,000                                | TP Kab/Kota   |
|     |                                            | Kab.<br>Lumajang                           | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 45,000                    | 45,000                                | TP Kab/Kota   |
| 7   | Provinsi<br>Nanggroe<br>Aceh<br>Darussalam | Provinsi<br>Nanggroe<br>Aceh<br>Darussalam | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 98,500                    | 98,500                                | Dekonsentrasi |
|     |                                            | Kab. Aceh<br>Besar                         | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 30,000                    | 30,000                                | TP Prop       |
|     |                                            | Kab. Pidie                                 | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 30,000                    | 30,000                                | TP Prop       |
|     |                                            | Kab. Aceh<br>Timur                         | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 30,000                    | 30,000                                | TP Prop       |
|     |                                            | Kab. Aceh<br>Tengah                        | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 30,000                    | 30,000                                | TP Prop       |
|     |                                            | Kab.<br>Simeuleu                           | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 30,000                    | 30,000                                | TP Prop       |
|     |                                            | Kab. Aceh<br>Gayo Lues                     | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 30,000                    | 30,000                                | TP Prop       |
|     |                                            | Kab. Bener<br>Meriah                       | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 30,000                    | 30,000                                | TP Prop       |
| 8   | Provinsi<br>Sumatera<br>Utara              | Provinsi<br>Sumatera<br>Utara              | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 135,000                   | 135,000                               | Dekonsentrasi |

| NO. | LOKASI |                         | OUTPUT                              | KOMPONEN                    | VOL | SATUAN  | ANGGARAN<br>(Ribu Rupiah) | Total<br>Anggaran<br>(Ribu<br>Rupiah) | Kewenangan  |
|-----|--------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----|---------|---------------------------|---------------------------------------|-------------|
|     |        | Kab. Deliserdang        | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop     |
|     |        | Kab. Karo               | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop     |
|     |        | Kab. Dairi              | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop     |
|     |        | Kab. Tapanuli Utara     | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop     |
|     |        | Kab. Tapanuli Selatan   | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 22,500                    | 22,500                                | TP Prop     |
|     |        | Kab. Samosir            | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 22,500                    | 22,500                                | TP Prop     |
|     |        | Kab. Mandailing Natal   | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 22,500                    | 22,500                                | TP Prop     |
|     |        | Kab. Humbang Hasundutan | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 22,500                    | 22,500                                | TP Prop     |
|     |        | Kab. Toba Samosir       | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 22,500                    | 22,500                                | TP Prop     |
|     |        | Kab. Serdang Bedagai    | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 22,500                    | 22,500                                | TP Prop     |
|     |        | Kab. Batubara           | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 22,500                    | 22,500                                | TP Prop     |
|     |        | Kota Medan              | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 22,500                    | 22,500                                | TP Prop     |
|     |        | Kab. Simalungun         | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 45,000                    | 45,000                                | TP Kab/Kota |

| NO. | LOKASI                        |                               | OUTPUT                                       | KOMPONEN                       | VOL | SATUAN  | ANGGARAN<br>(Ribu Rupiah) | Total<br>Anggaran<br>(Ribu<br>Rupiah) | Kewenangan    |
|-----|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----|---------|---------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 9   | Provinsi<br>Sumatera<br>Barat | Provinsi<br>Sumatera<br>Barat | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 135,000                   | 135,000                               | Dekonsentrasi |
|     |                               | Kab. Agam                     | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 23,000                    | 23,000                                | TP Prop       |
|     |                               | Kab.<br>Limapuluh<br>Kota     | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 23,000                    | 23,000                                | TP Prop       |
|     |                               | Kab. Pesisir<br>Selatan       | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 23,000                    | 23,000                                | TP Prop       |
|     |                               | Kab. Tanah<br>Datar           | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 23,000                    | 23,000                                | TP Prop       |
|     |                               | Kab.<br>Kepulauan<br>Mentawai | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 23,000                    | 23,000                                | TP Prop       |
|     |                               | Kab. Solok<br>Selatan         | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 23,000                    | 23,000                                | TP Prop       |
|     |                               | Kab.<br>Pasaman<br>Barat      | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 23,000                    | 23,000                                | TP Prop       |
|     |                               | Kab.<br>Sijunjung             | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 23,000                    | 23,000                                | TP Prop       |
|     |                               | Kota Padang<br>Panjang        | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 23,000                    | 23,000                                | TP Prop       |
|     |                               | Kota Padang                   | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 23,000                    | 23,000                                | TP Prop       |
|     |                               | Kota<br>Payakumbuh            | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                               | Kab. Solok                    | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 45,000                    | 45,000                                | TP Kab/Kota   |

| NO. | LOKASI         |                           | OUTPUT                              | KOMPONEN                    | VOL | SATUAN  | ANGGARAN<br>(Ribu Rupiah) | Total<br>Anggaran<br>(Ribu<br>Rupiah) | Kewenangan    |
|-----|----------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----|---------|---------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 10  | Provinsi Riau  | Provinsi Riau             | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 70,000                    | 70,000                                | Dekonsentrasi |
|     |                | Kab. Kampar               | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                | Kab. Indragiri Hulu       | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                | Kab. Indragiri Hilir      | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                | Kab. Rokan Hulu           | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                | Kab. Siak                 | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                | Kota Pekanbaru            | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                | Kota Dumai                | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
| 11  | Provinsi Jambi | Provinsi Jambi            | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 113,835                   | 113,835                               | Dekonsentrasi |
|     |                | Kab. Tanjung Jabung Barat | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                | Kab. Sarolangun           | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                | Kab. Kerinci              | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                | Kab. Merangin             | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |

| NO. | LOKASI                          |                                 | OUTPUT                                       | KOMPONEN                       | VOL | SATUAN  | ANGGARAN<br>(Ribu Rupiah) | Total<br>Anggaran<br>(Ribu<br>Rupiah) | Kewenangan    |
|-----|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----|---------|---------------------------|---------------------------------------|---------------|
|     |                                 | Kab. Tanjung<br>Jabung Timur    | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                                 | Kab. Tebo                       | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                                 | Kab. Muaro<br>Jambi             | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                                 | Kota Jambi                      | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                                 | Kota Sungai<br>Penuh            | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
| 12  | Provinsi<br>Sumatera<br>Selatan | Provinsi<br>Sumatera<br>Selatan | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 95,000                    | 95,000                                | Dekonsentrasi |
|     |                                 | Kab. Ogan<br>Komerling<br>Ulu   | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                                 | Kab. Muara<br>Enim              | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                                 | Kab. Musi<br>Rawas              | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                                 | Kab. Ogan<br>Komerling Ilir     | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                                 | Kab.<br>Banyuasin               | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                                 | Kab. Oku<br>Timur               | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                                 | Kab. Oku<br>Selatan             | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |

| NO. | LOKASI           |                      | OUTPUT                              | KOMPONEN                    | VOL | SATUAN  | ANGGARAN<br>(Ribu Rupiah) | Total<br>Anggaran<br>(Ribu<br>Rupiah) | Kewenangan    |
|-----|------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----|---------|---------------------------|---------------------------------------|---------------|
|     |                  | Kota Prabumulih      | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                  | Kota Pagar Alam      | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
| 13  | Provinsi Lampung | Provinsi Lampung     | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 69,400                    | 69,400                                | Dekonsentrasi |
|     |                  | Kab. Lampung Selatan | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                  | Kab. Lampung Tengah  | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                  | Kab. Lampung Barat   | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                  | Kab. Tulang Bawang   | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                  | Kab. Tanggamus       | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                  | Kab. Lampung Timur   | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                  | Kab. Way Kanan       | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                  | Kab. Pesawaran       | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                  | Kab. Pringsewu       | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                  | Kab. Mesuji          | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |

| NO. | LOKASI                    |                           | OUTPUT                              | KOMPONEN                    | VOL | SATUAN  | ANGGARAN<br>(Ribu Rupiah) | Total<br>Anggaran<br>(Ribu<br>Rupiah) | Kewenangan    |
|-----|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----|---------|---------------------------|---------------------------------------|---------------|
|     |                           | Kab. Tulang Bawang Barat  | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                           | Kab. Pesisir Barat        | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                           | Kota Metro                | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                           | Kab. Lampung Utara        | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                           | Kota Bandar Lampung       | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 20,000                    | 20,000                                | TP Prop       |
| 14  | Provinsi Kalimantan Barat | Provinsi Kalimantan Barat | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 95,000                    | 95,000                                | Dekonsentrasi |
|     |                           | Kab. Sanggau              | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                           | Kab. Mempawah             | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                           | Kab. Kapuas Hulu          | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                           | Kab. Ketapang             | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                           | Kab. Bengkayang           | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                           | Kab. Landak               | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                           | Kab. Sekadau              | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |

| NO. | LOKASI                           |                                  | OUTPUT                                       | KOMPONEN                       | VOL | SATUAN  | ANGGARAN<br>(Ribu Rupiah) | Total<br>Anggaran<br>(Ribu<br>Rupiah) | Kewenangan    |
|-----|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----|---------|---------------------------|---------------------------------------|---------------|
|     |                                  | Kab. Kayong<br>Utara             | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                                  | Kab. Kubu<br>Raya                | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                                  | Kota<br>Pontianak                | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 20,000                    | 20,000                                | TP Prop       |
|     |                                  | Kota<br>Singkawang               | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                                  | Kab. Sambas                      | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 45,000                    | 45,000                                | TP Kab/Kota   |
| 15  | Provinsi<br>Kalimantan<br>Tengah | Provinsi<br>Kalimantan<br>Tengah | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 80,000                    | 80,000                                | Dekonsentrasi |
|     |                                  | Kab. Kapuas                      | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                                  | Kab. Barito<br>Utara             | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                                  | Kab.<br>Kotawaringin<br>Timur    | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                                  | Kab.<br>Kotawaringin<br>Barat    | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                                  | Kab. Seruyan                     | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                                  | Kab. Gunung<br>Mas               | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                                  | Kab. Pulang<br>Pisau             | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |

| NO. | LOKASI                      |                             | OUTPUT                              | KOMPONEN                    | VOL | SATUAN  | ANGGARAN<br>(Ribu Rupiah) | Total<br>Anggaran<br>(Ribu<br>Rupiah) | Kewenangan    |
|-----|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----|---------|---------------------------|---------------------------------------|---------------|
|     |                             | Kab. Murung Raya            | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                             | Kab. Barito Timur           | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                             | Kota Palangkaraya           | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
| 16  | Provinsi Kalimantan Selatan | Provinsi Kalimantan Selatan | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 80,000                    | 80,000                                | Dekonsentrasi |
|     |                             | Kab. Banjar                 | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                             | Kab. Tanah Laut             | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                             | Kab. Tapin                  | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                             | Kab. Hulu Sungai Selatan    | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                             | Kab. Hulu Sungai Tengah     | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                             | Kab. Barito Kuala           | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                             | Kab. Tabalong               | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                             | Kab. Hulu Sungai Utara      | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                             | Kota Banjarbaru             | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |

| NO. | LOKASI                    |                           | OUTPUT                              | KOMPONEN                    | VOL | SATUAN  | ANGGARAN<br>(Ribu Rupiah) | Total<br>Anggaran<br>(Ribu<br>Rupiah) | Kewenangan    |
|-----|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----|---------|---------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 17  | Provinsi Kalimantan Timur | Provinsi Kalimantan Timur | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 49,120                    | 49,120                                | Dekonsentrasi |
|     |                           | Kab. Paser                | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                           | Kab. Berau                | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                           | Kab. Kutai Timur          | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                           | Kab. Penajam Paser Utara  | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                           | Kab. Kutai Kertanegara    | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                           | Kota Samarinda            | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                           | Kota Balikpapan           | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
| 18  | Provinsi Sulawesi Utara   | Provinsi Sulawesi Utara   | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 75,000                    | 75,000                                | Dekonsentrasi |
|     |                           | Kab. Kepulauan Sangihe    | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                           | Kab. Kepulauan Talaud     | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                           | Kab. Minahasa Selatan     | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                           | Kab. Tomohon              | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 20,000                    | 20,000                                | TP Prop       |

| NO. | LOKASI                   |                              | OUTPUT                              | KOMPONEN                    | VOL | SATUAN  | ANGGARAN<br>(Ribu Rupiah) | Total<br>Anggaran<br>(Ribu<br>Rupiah) | Kewenangan    |
|-----|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----|---------|---------------------------|---------------------------------------|---------------|
|     |                          | Kab. Minahasa Utara          | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                          | Kab. Bolaang Mongondow Timur | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                          | Kota Tomohon                 | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                          | Kab. Minahasa                | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 45,000                    | 45,000                                | TP Kab/Kota   |
| 19  | Provinsi Sulawesi Tengah | Provinsi Sulawesi Tengah     | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 80,000                    | 80,000                                | Dekonsentrasi |
|     |                          | Kab. Poso                    | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                          | Kab. Toli-Toli               | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                          | Kab. Banggai                 | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                          | Kab. Parigi Moutong          | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                          | Kab. Tojo Una-Una            | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                          | Kab. Sigi                    | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                          | Kota Palu                    | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                          | Kab. Donggala                | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 45,000                    | 45,000                                | TP Kab/Kota   |

| NO. | LOKASI                          |                                 | OUTPUT                                       | KOMPONEN                       | VOL | SATUAN  | ANGGARAN<br>(Ribu Rupiah) | Total<br>Anggaran<br>(Ribu<br>Rupiah) | Kewenangan    |
|-----|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----|---------|---------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 20  | Provinsi<br>Sulawesi<br>Selatan | Provinsi<br>Sulawesi<br>Selatan | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 136,600                   | 136,600                               | Dekonsentrasi |
|     |                                 | Kab. Pinrang                    | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                                 | Kab. Gowa                       | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                                 | Kab. Wajo                       | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                                 | Kab. Maros                      | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                                 | Kab. Sinjai                     | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                                 | Kab.<br>Bulukumba               | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                                 | Kab.<br>Kepulauan<br>Selayar    | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 20,000                    | 20,000                                | TP Prop       |
|     |                                 | Kab. Takalar                    | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                                 | Kab. Barru                      | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 20,000                    | 20,000                                | TP Prop       |
|     |                                 | Kab.<br>Pangkajene<br>Kepulauan | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 20,000                    | 20,000                                | TP Prop       |
|     |                                 | Kab.<br>Soppeng                 | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                                 | Kab. Luwu<br>Utara              | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |

| NO. | LOKASI                     |                            | OUTPUT                              | KOMPONEN                    | VOL | SATUAN  | ANGGARAN<br>(Ribu Rupiah) | Total<br>Anggaran<br>(Ribu<br>Rupiah) | Kewenangan    |
|-----|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----|---------|---------------------------|---------------------------------------|---------------|
|     |                            | Kota Makassar              | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 20,000                    | 20,000                                | TP Prop       |
|     |                            | Kota Palopo                | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                            | Kab. Bone                  | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 45,000                    | 45,000                                | TP Kab/Kota   |
|     |                            | Kab. Bantaeng              | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 45,000                    | 45,000                                | TP Kab/Kota   |
|     |                            | Kab. Jenepono              | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 45,000                    | 45,000                                | TP Kab/Kota   |
|     |                            | Kab. Enrekang              | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 45,000                    | 45,000                                | TP Kab/Kota   |
| 21  | Provinsi Sulawesi Tenggara | Provinsi Sulawesi Tenggara | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 76,000                    | 76,000                                | Dekonsentrasi |
|     |                            | Kab. Buton                 | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                            | Kab. Kolaka                | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                            | Kab. Konawe Selatan        | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                            | Kab. Bombana               | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                            | Kab. Kolaka Utara          | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                            | Kab. Konawe                | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |

| NO. | LOKASI          |                            | OUTPUT                              | KOMPONEN                    | VOL | SATUAN  | ANGGARAN<br>(Ribu Rupiah) | Total<br>Anggaran<br>(Ribu<br>Rupiah) | Kewenangan    |
|-----|-----------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----|---------|---------------------------|---------------------------------------|---------------|
|     |                 | Kab. Kolaka Timur          | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                 | Kab. Buton Selatan         | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
| 22  | Provinsi Maluku | Provinsi Maluku            | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 103,500                   | 103,500                               | Dekonsentrasi |
|     |                 | Kab. Maluku Tengah         | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                 | Kab. Maluku Tenggara       | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                 | Kab. Maluku Tenggara Barat | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                 | Kab. Pulau Buru            | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                 | Kab. Kepulauan Aru         | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 20,000                    | 20,000                                | TP Prop       |
|     |                 | Kab. Seram Bagian Barat    | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                 | Kab. Seram Bagian Timur    | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                 | Kab. Maluku Barat Daya     | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                 | Kota Ambon                 | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
| 23  | Provinsi Bali   | Provinsi Bali              | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 288,000                   | 288,000                               | Dekonsentrasi |

| NO. | LOKASI                       |                              | OUTPUT                              | KOMPONEN                    | VOL | SATUAN  | ANGGARAN<br>(Ribu Rupiah) | Total<br>Anggaran<br>(Ribu<br>Rupiah) | Kewenangan    |
|-----|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----|---------|---------------------------|---------------------------------------|---------------|
|     |                              | Kab. Buleleng                | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                              | Kab. Klungkung               | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                              | Kab. Gianyar                 | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                              | Kab. Karangasem              | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                              | Kab. Bangli                  | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                              | Kab. Tabanan                 | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 42,500                    | 42,500                                | TP Kab/Kota   |
| 24  | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 110,000                   | 110,000                               | Dekonsentrasi |
|     |                              | Kab. Lombok Barat            | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                              | Kab. Lombok Tengah           | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                              | Kab. Bima                    | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                              | Kab. Dompu                   | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                              | Kab. Sumbawa Barat           | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                              | Kab. Lombok Utara            | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |

| NO. | LOKASI                             |                                    | OUTPUT                                       | KOMPONEN                       | VOL | SATUAN  | ANGGARAN<br>(Ribu Rupiah) | Total<br>Anggaran<br>(Ribu<br>Rupiah) | Kewenangan    |
|-----|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----|---------|---------------------------|---------------------------------------|---------------|
|     |                                    | Kota<br>Mataram                    | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                                    | Kab. Lombok<br>Timur               | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 45,000                    | 45,000                                | TP Kab/Kota   |
|     |                                    | Kab.<br>Sumbawa                    | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 45,000                    | 45,000                                | TP Kab/Kota   |
| 25  | Provinsi Nusa<br>Tenggara<br>Timur | Provinsi Nusa<br>Tenggara<br>Timur | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 80,000                    | 80,000                                | Dekonsentrasi |
|     |                                    | Kab. Kupang                        | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                                    | Kab. Timor<br>Tengah Utara         | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 20,000                    | 20,000                                | TP Prop       |
|     |                                    | Kab. Timor<br>Tengah<br>Selatan    | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 20,000                    | 20,000                                | TP Prop       |
|     |                                    | Kab. Sikka                         | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 20,000                    | 20,000                                | TP Prop       |
|     |                                    | Kab. Flores<br>Timur               | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 20,000                    | 20,000                                | TP Prop       |
|     |                                    | Kab. Ende                          | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 20,000                    | 20,000                                | TP Prop       |
|     |                                    | Kab. Ngada                         | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 20,000                    | 20,000                                | TP Prop       |
|     |                                    | Kab.<br>Manggarai                  | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                                    | Kab. Sumba<br>Timur                | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |

| NO. | LOKASI         |                       | OUTPUT                              | KOMPONEN                    | VOL | SATUAN  | ANGGARAN<br>(Ribu Rupiah) | Total<br>Anggaran<br>(Ribu<br>Rupiah) | Kewenangan    |
|-----|----------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----|---------|---------------------------|---------------------------------------|---------------|
|     |                | Kab. Sumba Barat      | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                | Kab. Lembata          | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                | Kab. Rote Ndao        | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                | Kab. Manggarai Barat  | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                | Kab. Sumba Tengah     | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                | Kab. Sumba Barat Daya | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                | Kab. Manggarai Timur  | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                | Kab. Sabu Raijua      | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                | Kab. Malaka           | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                | Kab. Belu             | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 45,000                    | 45,000                                | TP Kab/Kota   |
| 26  | Provinsi Papua | Provinsi Papua        | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 121,300                   | 121,300                               | Dekonsentrasi |
|     |                | Kab. Jayapura         | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 20,000                    | 20,000                                | TP Prop       |
|     |                | Kab. Biak-Numfor      | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |

| NO. | LOKASI            |                     | OUTPUT                              | KOMPONEN                    | VOL | SATUAN  | ANGGARAN<br>(Ribu Rupiah) | Total<br>Anggaran<br>(Ribu<br>Rupiah) | Kewenangan    |
|-----|-------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----|---------|---------------------------|---------------------------------------|---------------|
|     |                   | Kab. Jayawijaya     | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                   | Kab. Nabire         | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                   | Kab. Mimika         | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                   | Kab. Boven Digoel   | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 20,000                    | 20,000                                | TP Prop       |
|     |                   | Kota Jayapura       | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                   | Kab. Merauke        | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 45,000                    | 45,000                                | TP Kab/Kota   |
|     |                   | Kab. Keerom         | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 45,000                    | 45,000                                | TP Kab/Kota   |
|     |                   | Kab. Lanny Jaya     | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 45,000                    | 45,000                                | TP Kab/Kota   |
| 27  | Provinsi Bengkulu | Provinsi Bengkulu   | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 70,000                    | 70,000                                | Dekonsentrasi |
|     |                   | Kab. Bengkulu Utara | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                   | Kab. Rejang Lebong  | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                   | Kab. Kaur           | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                   | Kab. Muko-muko      | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |

| NO. | LOKASI                   |                           | OUTPUT                                       | KOMPONEN                       | VOL | SATUAN  | ANGGARAN<br>(Ribu Rupiah) | Total<br>Anggaran<br>(Ribu<br>Rupiah) | Kewenangan    |
|-----|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----|---------|---------------------------|---------------------------------------|---------------|
|     |                          | Kab. Lebong               | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 20,000                    | 20,000                                | TP Prop       |
|     |                          | Kab. Kepahiang            | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 45,000                    | 45,000                                | TP Kab/Kota   |
| 28  | Provinsi<br>Maluku Utara | Provinsi<br>Maluku Utara  | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 65,000                    | 65,000                                | Dekonsentrasi |
|     |                          | Kab. Halmahera<br>Tengah  | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 20,000                    | 20,000                                | TP Prop       |
|     |                          | Kab. Halmahera<br>Selatan | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                          | Kab. Kepulauan<br>Sula    | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 20,000                    | 20,000                                | TP Prop       |
|     |                          | Kab. Halmahera<br>Timur   | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                          | Kab. Halmahera<br>Barat   | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                          | Kab. Pulau<br>Morotai     | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                          | Kota Ternate              | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                          | Kota Tidore<br>Kepulauan  | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
| 29  | Provinsi<br>Banten       | Provinsi<br>Banten        | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 66,600                    | 66,600                                | Dekonsentrasi |
|     |                          | Kab. Serang               | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |

| NO. | LOKASI                   |                          | OUTPUT                              | KOMPONEN                    | VOL | SATUAN  | ANGGARAN<br>(Ribu Rupiah) | Total<br>Anggaran<br>(Ribu<br>Rupiah) | Kewenangan    |
|-----|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----|---------|---------------------------|---------------------------------------|---------------|
|     |                          | Kab. Pandeglang          | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                          | Kab. Lebak               | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                          | Kab. Tangerang           | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
| 30  | Provinsi Bangka Belitung | Provinsi Bangka Belitung | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 49,010                    | 49,010                                | Dekonsentrasi |
|     |                          | Kab. Belitung            | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                          | Kab. Bangka              | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 20,000                    | 20,000                                | TP Prop       |
|     |                          | Kab. Bangka Tengah       | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
| 31  | Provinsi Gorontalo       | Provinsi Gorontalo       | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 70,000                    | 70,000                                | Dekonsentrasi |
|     |                          | Kab. Gorontalo           | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                          | Kab. Boalemo             | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                          | Kab. Pohuwato            | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                          | Kab. Bone Bolango        | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                          | Kab. Gorontalo Utara     | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | Penyusunan laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |

| NO. | LOKASI                        |                               | OUTPUT                                       | KOMPONEN                       | VOL | SATUAN  | ANGGARAN<br>(Ribu Rupiah) | Total<br>Anggaran<br>(Ribu<br>Rupiah) | Kewenangan    |
|-----|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----|---------|---------------------------|---------------------------------------|---------------|
|     |                               | Kota<br>Gorontalo             | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
| 32  | Provinsi<br>Kepulauan<br>Riau | Provinsi<br>Kepulauan<br>Riau | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 60,000                    | 60,000                                | Dekonsentrasi |
|     |                               | Kab. Bintan                   | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                               | Kab. Karimun                  | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                               | Kab. Natuna                   | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                               | Kab. Lingga                   | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                               | Kab.<br>Anambas               | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                               | Kota Batam                    | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
| 33  | Provinsi<br>Papua Barat       | Provinsi<br>Papua Barat       | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 65,000                    | 65,000                                | Dekonsentrasi |
|     |                               | Kab.<br>Manokwari             | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                               | Kab. Fak Fak                  | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                               | Kab. Sorong<br>Selatan        | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                               | Kab. Raja<br>Ampat            | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |

| NO. | LOKASI                                 |                                        | OUTPUT                                       | KOMPONEN                       | VOL | SATUAN  | ANGGARAN<br>(Ribu Rupiah) | Total<br>Anggaran<br>(Ribu<br>Rupiah) | Kewenangan    |
|-----|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----|---------|---------------------------|---------------------------------------|---------------|
|     |                                        | Kab. Teluk<br>Bintuni                  | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                                        | Kab. Teluk<br>Wondama                  | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 20,000                    | 20,000                                | TP Prop       |
|     |                                        | Kab.<br>Tambrauw                       | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                                        | Kab.<br>Pegunungan<br>Arfak            | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 20,000                    | 20,000                                | TP Prop       |
|     |                                        | Kab.<br>Manokwari<br>Selatan           | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                                        | Kota Sorong                            | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                                        | Kab. Sorong                            | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 45,000                    | 45,000                                | TP Kab/Kota   |
| 34  | Provinsi<br>Prop.<br>Sulawesi<br>Barat | Provinsi<br>Prop.<br>Sulawesi<br>Barat | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 65,000                    | 65,000                                | Dekonsentrasi |
|     |                                        | Kab. Mamuju                            | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                                        | Kab. Mamuju<br>Utara                   | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                                        | Kab. Polewali<br>Mandar                | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                                        | Kab. Mamasa                            | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                                        | Kab. Mamuju<br>Tengah                  | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |

| NO. | LOKASI                          |                                 | OUTPUT                                       | KOMPONEN                       | VOL | SATUAN  | ANGGARAN<br>(Ribu Rupiah) | Total<br>Anggaran<br>(Ribu<br>Rupiah) | Kewenangan    |
|-----|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----|---------|---------------------------|---------------------------------------|---------------|
|     |                                 | Kab. Majene                     | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 45,000                    | 45,000                                | TP Kab/Kota   |
| 35  | Provinsi<br>Kalimantan<br>Utara | Provinsi<br>Kalimantan<br>Utara | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 100,605                   | 100,605                               | Dekonsentrasi |
|     |                                 | Kota Tarakan                    | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 25,000                    | 25,000                                | TP Prop       |
|     |                                 | Kab.<br>Bulungan                | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 45,000                    | 45,000                                | TP Kab/Kota   |
|     |                                 | Kab.<br>Nunukan                 | Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Eselon I | Penyusunan<br>laporan keuangan | 1   | Laporan | 45,000                    | 45,000                                | TP Kab/Kota   |
|     | TOTAL ANGGARAN (Rp)             |                                 |                                              |                                |     |         | 42,743,766                | 42,743,766                            |               |



## LAYANAN PERKANTORAN (1774.994)



## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pelayanan publik yang dimaksud dalam Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003 (Menpan, 2003:2) adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Manajemen pelayanan publik merupakan salah satu kunci penentu keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka *nation and statebuilding*. Adanya manajemen publik yang baik akan menjamin tercapainya tujuan pembangunan secara khusus, dan tujuan berbangsa dan bernegara secara umum. Karenanya, langkah-langkah strategis dalam konteks penciptaan, pengembangan, dan penegakan sistem manajemen publik yang baik merupakan tuntutan sekaligus kebutuhan yang semakin tak terelakkan dalam dinamika pemerintahan dan pembangunan. Dalam upaya perwujudan manajemen publik yang baik terdapat pula tuntutan yang semakin aksentuatif untuk mengakomodasi, menginkorporasi, bahkan mengedepankan nilai-nilai *good governance*. Beberapa nilai yang relevan dan urgen untuk diperjuangkan adalah antara lain transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi stakeholders, disamping nilai-nilai efektivitas dan efisiensi tentu saja.

Sekretariat Jenderal Hortikultura memberikan fungsi pelayanan baik kepada pengguna layanan di luar kantor Direktorat Jenderal Hortikultura dan pengguna layanan di dalam kantor Direktorat Jenderal Hortikultura. Adapun bentuk layanan yang diberikan tersebut merupakan layanan dasar sebagai bagian dari peningkatan kinerja. Pelayanan kantor sendiri adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh kantor dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang dapat melibatkan baik barang maupun jasa. Pelayanan kantor sangat penting dalam proses menjalankan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diantaranya adalah melalui penyediaan kelengkapan sarana prasarana pendukung

dan fasilitas yang memadai dengan kondisi layak agar penyelenggaraan kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Pelayanan perkantoran harus dapat mengambil manfaat terbaik dari bahan, metode, sarana prasana, serta teknik lain untuk memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas pegawai dalam pengelolaan sumber daya hortikultura. Arah peningkatan kinerja dan kualitas sumber daya tersebut diharapkan berdampak pada pencapaian sasaran program peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu produk hortikultura berkelanjutan.

## **B. TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan adalah memberikan petunjuk pemanfaatan dan pengelolaan dana kegiatan layanan perkantoran yang menunjang kebutuhan operasional perkantoran.

Sasaran kegiatan adalah terciptanya tertib administrasi keuangan dan peningkatan kinerja berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura.

## BAB II PELAKSANAAN

### A. PELAKSANAAN DI PUSAT

1. Lokasi

Kegiatan layanan perkantoran ini dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian

2. Output/ Sub Output/ Komponen

Output : (994) Layanan perkantoran

Sub output : **(001) Tanpa Sub Output**

Komponen : (001) Gaji dan Tunjangan  
(002) Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura. Penerima manfaat adalah pegawai lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura.

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada DIPA Satker Direktorat Jenderal Hortikultura

5. Metode

Kegiatan pelayanan perkantoran di pusat mengakomodir administrasi kegiatan dari kegiatan di Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura. Secara rinci metode pelaksanaan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

**(994) Layanan Perkantoran**

Metode pelaksanaan kegiatan Layanan Perkantoran dipusat dilakukan melalui :

(001) Pembayaran Gaji dan Tunjangan dengan akun Belanja Gaji Pokok PNS (511111), dan atau Belanja Pembulatan Gaji PNS (511119), dan atau Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (511121), dan

atau Belanja Tunj. Anak PNS (511122), dan atau Belanja Tunj. Struktural PNS (511123), dan atau Belanja Tunj. Fungsional PNS (511124), dan atau Belanja Tunj. PPh PNS (511125), dan atau Belanja Tunj. Beras PNS (511126), dan atau Belanja Uang Makan PNS (511129), dan atau Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri (511147), dan atau Belanja Tunjangan Umum PNS (511151), dan atau Belanja Pegawai Transito (512412).

Pegawai Negeri Sipil (PNS) melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pembayaran gaji dan tunjangan merupakan salah satu bentuk apresiasi bagi PNS dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan organisasi. Bentuk perhatian pemerintah lainnya yang diberikan kepada PNS adalah berupa tunjangan uang makan, tunjangan suami/istri, tunjangan anak, dan tunjangan beras untuk mendukung kesejahteraan keluarga pegawai.

Selain itu untuk menunjang kinerja pemerintah memberikan tunjangan struktural PNS, tunjangan fungsional PNS, tunjangan PPh PNS, belanja tunjangan umum, dan belanja pegawai tunjangan khusus/kegiatan serta belanja pegawai transito. Dengan demikian, diharapkan PNS dapat bekerja optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan organisasi.

- (002) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran dengan akun Belanja Keperluan Perkantoran (521111), dan atau Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (521114), dan/ atau Belanja Barang Operasional Lainnya (521119), dan/ atau Belanja Bahan (521211), dan atau Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan/ atau Belanja Langganan Listrik (522111), dan atau Belanja Langganan Telepon (522112), dan/ atau Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111), dan/ atau Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121), dan/ atau Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina (523122), dan/ atau Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya (523199).

Untuk menunjang kegiatan operasional pekerjaan sehari-hari dikantor dibutuhkan fasilitas seperti telepon, daya listrik, pengiriman dokumen, penyediaan fasilitas rapat koordinasi, maupun pemeliharaan gedung, peralatan kantor, peralatan dan mesin, dan lain-lain. Selain itu fasilitas bahan bakar juga diperlukan untuk menunjang kelancaran operasional dan aktifitas pegawai.

## B. PELAKSANAAN DI PROVINSI

### 1. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan melalui dana dekonsentrasi pada satker **dinas pertanian provinsi** di 34 provinsi di Indonesia, dan melalui alokasi dana tugas pembantuan provinsi di 33 Provinsi. Adapun lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat pada Lampiran 3.

Output/ Sub Output/ Komponen

Output : (994) Layanan perkantoran

Sub output : **(001) Tanpa Sub Output**

Komponen : (051) Administrasi Mendukung Pelaksanaan Kegiatan

### 2. Pelaksana dan Penerima Manfaat

- Pelaksana kegiatan Anggaran Dekonsentrasi di Provinsi melalui :

(051) Administrasi Mendukung Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis hortikultura dan/ atau sekretariat dinas/ bagian yang menangani administrasi di bidang hortikultura (keuangan, pelaporan, dan data) Dinas Pertanian Provinsi. Penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi. Sedangkan penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini adalah pegawai lingkup teknis dan/ atau administrasi (perencanaan, data dan pelaporan) yang membidangi hortikultura di tingkat provinsi.

Pelaksanaan kegiatan layanan perkantoran dilaksanakan untuk mendukung kegiatan administratif pengembangan hortikultura di Provinsi.

- Pelaksana kegiatan Anggaran Tugas Pembantuan di Provinsi melalui :

(051) Administrasi Mendukung Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis hortikultura dan/atau sekretariat dinas/ bagian yang menangani administrasi bidang hortikultura (keuangan, pelaporan, dan data) Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang mendapat alokasi dana Tugas Pembantuan Provinsi. Penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi. Sedangkan penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini adalah pegawai lingkup teknis dan/atau administrasi (perencanaan, data dan pelaporan) yang membidangi hortikultura di tingkat provinsi dan Kabupaten/ Kota yang mendapat alokasi dana Tugas Pembantuan Provinsi terkait.

Pelaksanaan kegiatan layanan perkantoran dilaksanakan untuk mendukung kegiatan administratif pengembangan hortikultura di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendapat alokasi dana Tugas Pembantuan Provinsi terkait.

3. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada DIPA Satker Provinsi Tahun 2018.

4. Metode

- Metode pelaksanaan kegiatan Layanan perkantoran dana Dekonsentrasi di provinsi dilakukan melalui :

(051) Administrasi Mendukung Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini berkaitan dengan administrasi perkantoran seperti penyediaan blangko-blangko, penggandaan, pengiriman surat kedinasan, dan pelayanan satuan kerja, termasuk di dalamnya honor mantri tani di tingkat provinsi. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan mendukung koordinasi dan kegiatan teknis lainnya.

Kegiatan administrasi mendukung pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui akun Honor Operasional Satuan Kerja (521115), dan atau Belanja Bahan (521211), dan atau Honor Output Kegiatan (521213), dan atau Belanja Barang Persediaan

Barang Konsumsi (521811), dan atau Belanja Jasa Profesi (522151), dan atau belanja perjalanan biasa (524111), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119), dan atau Belanja Jasa Pos dan Giro (522121).

- Metode pelaksanaan kegiatan Layanan Perkantoran dan Tugas Pembantuan di provinsi dilakukan melalui :

(051) Administrasi Mendukung Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini berkaitan dengan administrasi perkantoran seperti penyediaan blangko-blangko, penggandaan, pengiriman surat kedinasan, serta pelayanan satuan kerja di tingkat provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan di provinsi . Selain itu juga dilaksanakan kegiatan mendukung koordinasi dan kegiatan teknis lainnya.

Kegiatan administrasi mendukung pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui akun Honor Operasional Satuan Kerja (521115), dan atau Belanja Bahan (521211), dan atau Honor Output Kegiatan (521213), dan atau Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan atau belanja perjalanan biasa (524111), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119), dan atau Belanja Jasa Pos dan Giro (522121).

## C. PELAKSANAAN DI KABUPATEN

### 1. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan pada dinas teknis yang membidangi hortikultura di tingkat Kabupaten/Kota di 36 Kab/Kota di Indonesia. Adapun lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat pada Lampiran 3.

Output/ Sub Output/ Komponen

Output : (994) Layanan perkantoran

Sub output : **(001) Tanpa Sub Output**

Komponen : (051) Administrasi Mendukung Pelaksanaan Kegiatan

## 2. Pelaksana dan Penerima Manfaat

### (051) administrasi mendukung Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksana kegiatan administrasi mendukung Pelaksanaan Kegiatan adalah bidang teknis hortikultura dan/atau sekretariat dinas/ bagian yang menangani administrasi bidang hortikultura (keuangan, data dan pelaporan) Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota yang mendapat alokasi dana Tugas Pembantuan. Penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota. Sedangkan Penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini adalah pegawai lingkup teknis dan/atau administrasi (keuangan, data dan pelaporan) yang membidangi hortikultura di Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota terkait.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan untuk mendukung perencanaan dan kegiatan pengembangan hortikultura di Kabupaten/ Kota yang mendapat alokasi Dana Tugas Pembantuan.

Kegiatan ini berkaitan dengan administrasi perkantoran seperti penyediaan blangko-blangko, penggandaan, pengiriman surat kedinasan, serta pelayanan satuan kerja di Kabupaten/ Kota untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan mendukung koordinasi dan kegiatan teknis lainnya dalam pengembangan hortikultura.

## 3. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada DIPA Tahun Anggaran 2018 Satker Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

## 4. Metode

Kegiatan pelayanan perkantoran di kabupaten/ kota mengakomodir administrasi kegiatan dari kegiatan di bidang hortikultura. Secara rinci metode pelaksanaan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

(051) Administrasi mendukung pelaksanaan kegiatan dengan akun Honor Operasional Satuan Kerja (521115), dan atau Belanja Bahan (521211), dan atau Belanja Barang Non Operasional

Lainnya (521219), dan atau Honor Output Kegiatan (521213), dan atau Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113), dan atau Belanja Perjalanan Biasa (524111).

Kegiatan ini berkaitan dengan administrasi perkantoran seperti penyediaan blangko-blangko, penggandaan, serta pengiriman surat kedinasan. Pelayanan satuan kerja baik di tingkat Kabupaten/Kota. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan mendukung koordinasi dan monitoring kegiatan teknis lainnya.

## **BAB III**

### **INDIKATOR KINERJA**

#### **A. MASUKAN/ INPUT**

1. Dana Rp. 77.242.190.000,-
2. SDM
3. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018.

#### **B. KELUARAN/ OUTPUT**

1. Tersedianya fasilitas pelayanan perkantoran yang memadai selama 12 bulan layanan;
2. Terlaksananya kegiatan layanan perkantoran di pusat dan di 34 provinsi, 33 satker TP Provinsi, dan 36 TP Kabupaten/Kota

#### **C. HASIL/ OUTCOME**

Terciptanya kelancaran administrasi kegiatan dan pelayanan perkantoran lainnya dalam menunjang pelaksanaan kegiatan

#### **D. MANFAAT/ BENEFIT**

Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan teknis pelaksanaan sub sektor hortikultura dengan tertib dan lancar.

#### **E. DAMPAK/ IMPACT**

Meningkatnya kinerja dalam pelaksanaan program pengembangan sub sektor hortikultura

### LAMPIRAN 3. LOKASI OUTPUT LAYANAN PERKANTORAN (1774.994)

| NO. | LOKASI                  |                         | OUTPUT                 | KOMPONEN                                       | VOL | SATUAN           | ANGGARAN<br>(Ribu Rupiah) | Total Anggaran<br>(Ribu Rupiah) | Kewenangan    |
|-----|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-----|------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|
|     | Pusat                   | Pusat                   | Layanan<br>Perkantoran | Operasional dan<br>Pemeliharaan<br>Perkantoran | 12  | Bulan<br>Layanan | 13,305,555                | 42,289,160                      |               |
|     |                         |                         |                        | Gaji dan<br>Tunjangan                          | 14  | Bulan<br>Layanan | 28,983,605                |                                 |               |
| 1   | Provinsi DKI<br>Jakarta | Provinsi DKI<br>Jakarta | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan                       | 12  | Bulan<br>Layanan | 228,000                   | 228,000                         | Dekonsentrasi |
| 2   | Provinsi Jawa<br>Barat  | Provinsi Jawa<br>Barat  | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan                       | 12  | Bulan<br>Layanan | 1,982,000                 | 1,982,000                       | Dekonsentrasi |
|     |                         | Kab. Bogor              | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan                       | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                         | Kab. Sukabumi           | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan                       | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                         | Kab. Subang             | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan                       | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                         | Kab. Tasikmalaya        | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan                       | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                         | Kab. Ciamis             | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan                       | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                         | Kab. Cirebon            | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan                       | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                         | Kab. Kuningan           | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan                       | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                         | Kab. Indramayu          | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan                       | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                         | Kab. Bandung<br>Barat   | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan                       | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                         | Kab. Pangandaran        | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan                       | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                         | Kota Tasikmalaya        | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan                       | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                         | Kab. Cianjur            | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan                       | 12  | Bulan<br>Layanan | 60,000                    | 60,000                          | TP Kab/Kota   |
|     |                         | Kab. Bandung            | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan                       | 12  | Bulan<br>Layanan | 60,000                    | 60,000                          | TP Kab/Kota   |

| NO. | LOKASI                  |                         | OUTPUT                 | KOMPONEN                 | VOL | SATUAN           | ANGGARAN<br>(Ribu Rupiah) | Total Anggaran<br>(Ribu Rupiah) | Kewenangan    |
|-----|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|-----|------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|
|     |                         | Kab. Sumedang           | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 60,000                    | 60,000                          | TP Kab/Kota   |
|     |                         | Kab. Garut              | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 60,000                    | 60,000                          | TP Kab/Kota   |
|     |                         | Kab. Majalengka         | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 60,000                    | 60,000                          | TP Kab/Kota   |
| 3   | Provinsi Jawa<br>Tengah | Provinsi Jawa<br>Tengah | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 1,823,000                 | 1,823,000                       | Dekonsentrasi |
|     |                         | Kab. Semarang           | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                         | Kab. Kendal             | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                         | Kab. Demak              | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                         | Kab. Pekalongan         | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                         | Kab. Tegal              | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                         | Kab. Brebes             | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                         | Kab. Pati               | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                         | Kab. Kudus              | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                         | Kab. Pemalang           | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                         | Kab. Jepara             | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                         | Kab. Rembang            | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                         | Kab. Blora              | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                         | Kab. Cilacap            | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                         | Kab. Purbalingga        | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                         | Kab. Banjarnegara       | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |

| NO. | LOKASI                    |                           | OUTPUT                 | KOMPONEN                 | VOL | SATUAN           | ANGGARAN<br>(Ribu Rupiah) | Total Anggaran<br>(Ribu Rupiah) | Kewenangan    |
|-----|---------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|-----|------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|
|     |                           | Kab. Wonosobo             | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                           | Kab. Purworejo            | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                           | Kab. Kebumen              | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                           | Kab. Klaten               | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                           | Kab. Boyolali             | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | bulan            | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                           | Kab. Sragen               | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                           | Kab. Wonogiri             | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                           | Kab. Grobogan             | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 60,000                    | 60,000                          | TP Kab/Kota   |
|     |                           | Kab. Batang               | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 60,000                    | 60,000                          | TP Kab/Kota   |
|     |                           | Kab. Magelang             | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 60,000                    | 60,000                          | TP Kab/Kota   |
|     |                           | Kab. Temanggung           | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 60,000                    | 60,000                          | TP Kab/Kota   |
|     |                           | Kab. Karanganyar          | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 60,000                    | 60,000                          | TP Kab/Kota   |
| 4   | Provinsi Di<br>Yogyakarta | Provinsi Di<br>Yogyakarta | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 338,000                   | 338,000                         | Dekonsentrasi |
|     |                           | Kab. Bantul               | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                           | Kab. Sleman               | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                           | Kab. Gunungkidul          | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                           | Kab. Kulonprogo           | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
| 5   | Provinsi Jawa<br>Timur    | Provinsi Jawa<br>Timur    | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 2,090,000                 | 2,090,000                       | Dekonsentrasi |
|     |                           | Kab. Gresik               | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |

| NO. | LOKASI          | OUTPUT                 | KOMPONEN                 | VOL | SATUAN           | ANGGARAN<br>(Ribu Rupiah) | Total Anggaran<br>(Ribu Rupiah) | Kewenangan  |
|-----|-----------------|------------------------|--------------------------|-----|------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|
|     | Kab. Mojokerto  | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop     |
|     | Kab. Pamekasan  | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop     |
|     | Kab. Sumenep    | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop     |
|     | Kab. Situbondo  | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop     |
|     | Kab. Jember     | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop     |
|     | Kab. Pasuruan   | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop     |
|     | Kab. Kediri     | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop     |
|     | Kab. Nganjuk    | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop     |
|     | Kab. Trenggalek | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop     |
|     | Kab. Blitar     | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop     |
|     | Kab. Magetan    | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop     |
|     | Kab. Ponorogo   | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop     |
|     | Kab. Pacitan    | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop     |
|     | Kab. Bojonegoro | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop     |
|     | Kab. Tuban      | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop     |
|     | Kab. Lamongan   | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop     |
|     | Kota Batu       | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop     |
|     | Kab. Bondowoso  | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 60,000                    | 60,000                          | TP Kab/Kota |
|     | Kab. Banyuwangi | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 60,000                    | 60,000                          | TP Kab/Kota |

| NO. | LOKASI                                     |                                      | OUTPUT                 | KOMPONEN                 | VOL | SATUAN           | ANGGARAN<br>(Ribu Rupiah) | Total Anggaran<br>(Ribu Rupiah) | Kewenangan    |
|-----|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----|------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|
|     |                                            | Kab. Malang                          | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 60,000                    | 60,000                          | TP Kab/Kota   |
|     |                                            | Kab. Probolinggo                     | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 60,000                    | 60,000                          | TP Kab/Kota   |
|     |                                            | Kab. Lumajang                        | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 60,000                    | 60,000                          | TP Kab/Kota   |
| 6   | Provinsi<br>Nanggroe<br>Aceh<br>Darussalam | Provinsi Nanggroe<br>Aceh Darussalam | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 972,500                   | 972,500                         | Dekonsentrasi |
|     |                                            | Kab. Aceh Besar                      | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 40,000                    | 40,000                          | TP Prop       |
|     |                                            | Kab. Pidie                           | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                            | Kab. Aceh Timur                      | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                            | Kab. Aceh Tengah                     | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                            | Kab. Simeuleu                        | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                            | Kab. Aceh Gayo<br>Lues               | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | bulan            | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                            | Kab. Bener Meriah                    | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
| 7   | Provinsi<br>Sumatera<br>Utara              | Provinsi Sumatera<br>Utara           | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 1,424,000                 | 1,424,000                       | Dekonsentrasi |
|     |                                            | Kab. Deliserdang                     | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                            | Kab. Karo                            | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                            | Kab. Dairi                           | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                            | Kab. Tapanuli<br>Utara               | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                            | Kab. Tapanuli<br>Selatan             | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                            | Kab. Samosir                         | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |

| NO. | LOKASI                        |                            | OUTPUT                 | KOMPONEN                 | VOL | SATUAN           | ANGGARAN<br>(Ribu Rupiah) | Total Anggaran<br>(Ribu Rupiah) | Kewenangan    |
|-----|-------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-----|------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|
|     |                               | Kab. Mandailing<br>Natal   | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                               | Kab. Humbang<br>Hasundutan | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                               | Kab. Toba Samosir          | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                               | Kab. Serdang<br>Bedagai    | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                               | Kab. Batubara              | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                               | Kota Medan                 | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                               | Kab. Simalungun            | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 60,000                    | 60,000                          | TP Kab/Kota   |
| 8   | Provinsi<br>Sumatera<br>Barat | Provinsi Sumatera<br>Barat | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 641,000                   | 641,000                         | Dekonsentrasi |
|     |                               | Kab. Agam                  | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 33,000                    | 33,000                          | TP Prop       |
|     |                               | Kab. Limapuluh<br>Kota     | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 33,000                    | 33,000                          | TP Prop       |
|     |                               | Kab. Pesisir<br>Selatan    | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 33,000                    | 33,000                          | TP Prop       |
|     |                               | Kab. Tanah Datar           | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 33,000                    | 33,000                          | TP Prop       |
|     |                               | Kab. Kepulauan<br>Mentawai | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 33,000                    | 33,000                          | TP Prop       |
|     |                               | Kab. Solok Selatan         | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 33,000                    | 33,000                          | TP Prop       |
|     |                               | Kab. Pasaman<br>Barat      | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 33,000                    | 33,000                          | TP Prop       |
|     |                               | Kab. Sijunjung             | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 33,000                    | 33,000                          | TP Prop       |
|     |                               | Kota Padang<br>Panjang     | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 33,000                    | 33,000                          | TP Prop       |
|     |                               | Kota Padang                | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 33,000                    | 33,000                          | TP Prop       |
|     |                               | Kota Payakumbuh            | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |

| NO. | LOKASI         |                              | OUTPUT                 | KOMPONEN                 | VOL | SATUAN           | ANGGARAN<br>(Ribu Rupiah) | Total Anggaran<br>(Ribu Rupiah) | Kewenangan    |
|-----|----------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|-----|------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|
|     |                | Kab. Solok                   | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 60,000                    | 60,000                          | TP Kab/Kota   |
| 9   | Provinsi Riau  | Provinsi Riau                | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 602,000                   | 602,000                         | Dekonsentrasi |
|     |                | Kab. Kampar                  | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                | Kab. Indragiri<br>Hulu       | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                | Kab. Indragiri Hilir         | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                | Kab. Rokan Hulu              | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                | Kab. Siak                    | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                | Kota Pekanbaru               | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                | Kota Dumai                   | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
| 10  | Provinsi Jambi | Provinsi Jambi               | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 472,165                   | 472,165                         | Dekonsentrasi |
|     |                | Kab. Tanjung<br>Jabung Barat | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 30,000                    | 30,000                          | TP Prop       |
|     |                | Kab. Sarolangun              | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                | Kab. Kerinci                 | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                | Kab. Merangin                | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                | Kab. Tanjung<br>Jabung Timur | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 30,000                    | 30,000                          | TP Prop       |
|     |                | Kab. Tebo                    | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 30,000                    | 30,000                          | TP Prop       |
|     |                | Kab. Muaro Jambi             | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                | Kota Jambi                   | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 30,000                    | 30,000                          | TP Prop       |
|     |                | Kota Sungai<br>Penuh         | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |

| NO. | LOKASI                    |                           | OUTPUT              | KOMPONEN              | VOL | SATUAN        | ANGGARAN<br>(Ribu Rupiah) | Total Anggaran<br>(Ribu Rupiah) | Kewenangan    |
|-----|---------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|-----|---------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|
| 11  | Provinsi Sumatera Selatan | Provinsi Sumatera Selatan | Layanan Perkantoran | Administrasi Kegiatan | 12  | Bulan Layanan | 800,000                   | 800,000                         | Dekonsentrasi |
|     |                           | Kab. Ogan Komering Ulu    | Layanan Perkantoran | Administrasi Kegiatan | 12  | Bulan Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                           | Kab. Muara Enim           | Layanan Perkantoran | Administrasi Kegiatan | 12  | bulan         | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                           | Kab. Musi Rawas           | Layanan Perkantoran | Administrasi Kegiatan | 12  | Bulan Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                           | Kab. Ogan Komering Ilir   | Layanan Perkantoran | Administrasi Kegiatan | 12  | Bulan Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                           | Kab. Banyuasin            | Layanan Perkantoran | Administrasi Kegiatan | 12  | Bulan Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                           | Kab. Oku Timur            | Layanan Perkantoran | Administrasi Kegiatan | 12  | Bulan Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                           | Kab. Oku Selatan          | Layanan Perkantoran | Administrasi Kegiatan | 12  | Bulan Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                           | Kota Prabumulih           | Layanan Perkantoran | Administrasi Kegiatan | 12  | Bulan Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                           | Kota Pagar Alam           | Layanan Perkantoran | Administrasi Kegiatan | 12  | Bulan Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
| 12  | Provinsi Lampung          | Provinsi Lampung          | Layanan Perkantoran | Administrasi Kegiatan | 12  | Bulan Layanan | 815,600                   | 815,600                         | Dekonsentrasi |
|     |                           | Kab. Lampung Selatan      | Layanan Perkantoran | Administrasi Kegiatan | 12  | Bulan Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                           | Kab. Lampung Tengah       | Layanan Perkantoran | Administrasi Kegiatan | 12  | Bulan Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                           | Kab. Lampung Barat        | Layanan Perkantoran | Administrasi Kegiatan | 12  | bulan         | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                           | Kab. Tulang Bawang        | Layanan Perkantoran | Administrasi Kegiatan | 12  | Bulan Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                           | Kab. Tanggamus            | Layanan Perkantoran | Administrasi Kegiatan | 12  | Bulan Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                           | Kab. Lampung Timur        | Layanan Perkantoran | Administrasi Kegiatan | 12  | bulan         | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                           | Kab. Way Kanan            | Layanan Perkantoran | Administrasi Kegiatan | 12  | Bulan Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                           | Kab. Pesawaran            | Layanan Perkantoran | Administrasi Kegiatan | 12  | Bulan Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |

| NO. | LOKASI                          |                              | OUTPUT                 | KOMPONEN                 | VOL | SATUAN           | ANGGARAN<br>(Ribu Rupiah) | Total Anggaran<br>(Ribu Rupiah) | Kewenangan    |
|-----|---------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|-----|------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|
|     |                                 | Kab. Pringsewu               | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                 | Kab. Mesuji                  | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                 | Kab. Tulang<br>Bawang Barat  | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                 | Kab. Pesisir Barat           | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                 | Kota Metro                   | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                 | Kab. Lampung<br>Utara        | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                 | Kota Bandar<br>Lampung       | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 20,000                    | 20,000                          | TP Prop       |
| 13  | Provinsi<br>Kalimantan<br>Barat | Provinsi<br>Kalimantan Barat | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 614,000                   | 614,000                         | Dekonsentrasi |
|     |                                 | Kab. Sanggau                 | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                 | Kab. Mempawah                | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                 | Kab. Kapuas Hulu             | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                 | Kab. Ketapang                | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                 | Kab. Bengkayang              | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                 | Kab. Landak                  | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                 | Kab. Sekadau                 | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                 | Kab. Kayong Utara            | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                 | Kab. Kubu Raya               | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                 | Kota Pontianak               | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 20,000                    | 20,000                          | TP Prop       |
|     |                                 | Kota Singkawang              | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |

| NO. | LOKASI                            |                                   | OUTPUT                 | KOMPONEN                 | VOL | SATUAN           | ANGGARAN<br>(Ribu Rupiah) | Total Anggaran<br>(Ribu Rupiah) | Kewenangan    |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|-----|------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|
|     |                                   | Kab. Sambas                       | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 60,000                    | 60,000                          | TP Kab/Kota   |
| 14  | Provinsi<br>Kalimantan<br>Tengah  | Provinsi<br>Kalimantan<br>Tengah  | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 512,000                   | 512,000                         | Dekonsentrasi |
|     |                                   | Kab. Kapuas                       | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                   | Kab. Barito Utara                 | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                   | Kab. Kotawaringin<br>Timur        | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                   | Kab. Kotawaringin<br>Barat        | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                   | Kab. Seruyan                      | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                   | Kab. Gunung Mas                   | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                   | Kab. Pulang Pisau                 | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                   | Kab. Murung Raya                  | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                   | Kab. Barito Timur                 | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                   | Kota Palangkaraya                 | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
| 15  | Provinsi<br>Kalimantan<br>Selatan | Provinsi<br>Kalimantan<br>Selatan | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 560,000                   | 560,000                         | Dekonsentrasi |
|     |                                   | Kab. Banjar                       | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                   | Kab. Tanah Laut                   | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                   | Kab. Tapin                        | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                   | Kab. Hulu Sungai<br>Selatan       | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                   | Kab. Hulu Sungai<br>Tengah        | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |

| NO. | LOKASI                          |                              | OUTPUT                 | KOMPONEN                 | VOL | SATUAN           | ANGGARAN<br>(Ribu Rupiah) | Total Anggaran<br>(Ribu Rupiah) | Kewenangan    |
|-----|---------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|-----|------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|
|     |                                 | Kab. Barito Kuala            | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                 | Kab. Tabalong                | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                 | Kab. Hulu Sungai<br>Utara    | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | bulan            | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                 | Kota Banjarbaru              | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
| 16  | Provinsi<br>Kalimantan<br>Timur | Provinsi<br>Kalimantan Timur | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 438,880                   | 438,880                         | Dekonsentrasi |
|     |                                 | Kab. Paser                   | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                 | Kab. Berau                   | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                 | Kab. Kutai Timur             | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                 | Kab. Penajam<br>Paser Utara  | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                 | Kab. Kutai<br>Kertanegara    | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                 | Kota Samarinda               | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                 | Kota Balikpapan              | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
| 17  | Provinsi<br>Sulawesi<br>Utara   | Provinsi Sulawesi<br>Utara   | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 605,000                   | 605,000                         | Dekonsentrasi |
|     |                                 | Kab. Kepulauan<br>Sangihe    | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                 | Kab. Kepulauan<br>Talaud     | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                 | Kab. Minahasa<br>Selatan     | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                 | Kab. Tomohon                 | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 20,000                    | 20,000                          | TP Prop       |
|     |                                 | Kab. Minahasa<br>Utara       | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |

| NO. | LOKASI                    |                              | OUTPUT              | KOMPONEN              | VOL | SATUAN        | ANGGARAN<br>(Ribu Rupiah) | Total Anggaran<br>(Ribu Rupiah) | Kewenangan    |
|-----|---------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|-----|---------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|
|     |                           | Kab. Bolaang Mongondow Timur | Layanan Perkantoran | Administrasi Kegiatan | 12  | Bulan Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                           | Kota Tomohon                 | Layanan Perkantoran | Administrasi Kegiatan | 12  | Bulan Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                           | Kab. Minahasa                | Layanan Perkantoran | Administrasi Kegiatan | 12  | Bulan Layanan | 60,000                    | 60,000                          | TP Kab/Kota   |
| 18  | Provinsi Sulawesi Tengah  | Provinsi Sulawesi Tengah     | Layanan Perkantoran | Administrasi Kegiatan | 12  | Bulan Layanan | 632,000                   | 632,000                         | Dekonsentrasi |
|     |                           | Kab. Poso                    | Layanan Perkantoran | Administrasi Kegiatan | 12  | Bulan Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                           | Kab. Toli-Toli               | Layanan Perkantoran | Administrasi Kegiatan | 12  | Bulan Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                           | Kab. Banggai                 | Layanan Perkantoran | Administrasi Kegiatan | 12  | Bulan Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                           | Kab. Parigi Moutong          | Layanan Perkantoran | Administrasi Kegiatan | 12  | Bulan Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                           | Kab. Tojo Una-Una            | Layanan Perkantoran | Administrasi Kegiatan | 12  | bulan         | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                           | Kab. Sigi                    | Layanan Perkantoran | Administrasi Kegiatan | 12  | Bulan Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                           | Kota Palu                    | Layanan Perkantoran | Administrasi Kegiatan | 12  | Bulan Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                           | Kab. Donggala                | Layanan Perkantoran | Administrasi Kegiatan | 12  | Bulan Layanan | 60,000                    | 60,000                          | TP Kab/Kota   |
| 19  | Provinsi Sulawesi Selatan | Provinsi Sulawesi Selatan    | Layanan Perkantoran | Administrasi Kegiatan | 12  | Bulan Layanan | 977,400                   | 977,400                         | Dekonsentrasi |
|     |                           | Kab. Pinrang                 | Layanan Perkantoran | Administrasi Kegiatan | 12  | Bulan Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                           | Kab. Gowa                    | Layanan Perkantoran | Administrasi Kegiatan | 12  | Bulan Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                           | Kab. Wajo                    | Layanan Perkantoran | Administrasi Kegiatan | 12  | Bulan Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                           | Kab. Maros                   | Layanan Perkantoran | Administrasi Kegiatan | 12  | Bulan Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                           | Kab. Sinjai                  | Layanan Perkantoran | Administrasi Kegiatan | 12  | Bulan Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |

| NO. | LOKASI                           |                               | OUTPUT                 | KOMPONEN                 | VOL | SATUAN           | ANGGARAN<br>(Ribu Rupiah) | Total Anggaran<br>(Ribu Rupiah) | Kewenangan    |
|-----|----------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|-----|------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|
|     |                                  | Kab. Bulukumba                | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                  | Kab. Kepulauan<br>Selayar     | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 20,000                    | 20,000                          | TP Prop       |
|     |                                  | Kab. Takalar                  | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                  | Kab. Barru                    | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 20,000                    | 20,000                          | TP Prop       |
|     |                                  | Kab. Pangkajene<br>Kepulauan  | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 20,000                    | 20,000                          | TP Prop       |
|     |                                  | Kab. Soppeng                  | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                  | Kab. Luwu Utara               | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | bulan            | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                  | Kota Makassar                 | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 20,000                    | 20,000                          | TP Prop       |
|     |                                  | Kota Palopo                   | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                  | Kab. Bone                     | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 60,000                    | 60,000                          | TP Kab/Kota   |
|     |                                  | Kab. Bantaeng                 | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 60,000                    | 60,000                          | TP Kab/Kota   |
|     |                                  | Kab. Jeneponto                | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 60,000                    | 60,000                          | TP Kab/Kota   |
|     |                                  | Kab. Enrekang                 | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 60,000                    | 60,000                          | TP Kab/Kota   |
| 20  | Provinsi<br>Sulawesi<br>Tenggara | Provinsi Sulawesi<br>Tenggara | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 813,000                   | 813,000                         | Dekonsentrasi |
|     |                                  | Kab. Buton                    | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                  | Kab. Kolaka                   | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                  | Kab. Konawe<br>Selatan        | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                  | Kab. Bombana                  | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                  | Kab. Kolaka Utara             | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |

| NO. | LOKASI             |                               | OUTPUT                 | KOMPONEN                 | VOL | SATUAN           | ANGGARAN<br>(Ribu Rupiah) | Total Anggaran<br>(Ribu Rupiah) | Kewenangan    |
|-----|--------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|-----|------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|
|     |                    | Kab. Konawe                   | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                    | Kab. Kolaka Timur             | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                    | Kab. Buton<br>Selatan         | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
| 21  | Provinsi<br>Maluku | Provinsi Maluku               | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 310,500                   | 310,500                         | Dekonsentrasi |
|     |                    | Kab. Maluku<br>Tengah         | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                    | Kab. Maluku<br>Tenggara       | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                    | Kab. Maluku<br>Tenggara Barat | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                    | Kab. Pulau Buru               | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 20,000                    | 20,000                          | TP Prop       |
|     |                    | Kab. Kepulauan<br>Aru         | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                    | Kab. Seram<br>Bagian Barat    | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                    | Kab. Seram<br>Bagian Timur    | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                    | Kab. Maluku Barat<br>Daya     | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                    | Kota Ambon                    | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
| 22  | Provinsi Bali      | Provinsi Bali                 | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 67,000                    | 67,000                          | Dekonsentrasi |
|     |                    | Kab. Buleleng                 | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                    | Kab. Klungkung                | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                    | Kab. Gianyar                  | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                    | Kab. Karangasem               | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                    | Kab. Bangli                   | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |

| NO. | LOKASI                             |                                 | OUTPUT                 | KOMPONEN                 | VOL | SATUAN           | ANGGARAN<br>(Ribu Rupiah) | Total Anggaran<br>(Ribu Rupiah) | Kewenangan    |
|-----|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|-----|------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|
|     |                                    | Kab. Tabanan                    | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 62,500                    | 62,500                          | TP Kab/Kota   |
| 23  | Provinsi Nusa<br>Tenggara Barat    | Provinsi Nusa<br>Tenggara Barat | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 452,000                   | 452,000                         | Dekonsentrasi |
|     |                                    | Kab. Lombok<br>Barat            | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                    | Kab. Lombok<br>Tengah           | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                    | Kab. Bima                       | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                    | Kab. Dompu                      | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                    | Kab. Sumbawa<br>Barat           | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                    | Kab. Lombok<br>Utara            | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                    | Kota Mataram                    | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                    | Kab. Lombok<br>Timur            | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 60,000                    | 60,000                          | TP Kab/Kota   |
|     |                                    | Kab. Sumbawa                    | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 60,000                    | 60,000                          | TP Kab/Kota   |
| 24  | Provinsi Nusa<br>Tenggara<br>Timur | Provinsi Nusa<br>Tenggara Timur | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 1,025,000                 | 1,025,000                       | Dekonsentrasi |
|     |                                    | Kab. Kupang                     | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                    | Kab. Timor Tengah<br>Utara      | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                    | Kab. Timor Tengah<br>Selatan    | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                    | Kab. Sikka                      | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                    | Kab. Flores Timur               | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                    | Kab. Ende                       | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                    | Kab. Ngada                      | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |

| NO. | LOKASI         |                          | OUTPUT                 | KOMPONEN                 | VOL | SATUAN           | ANGGARAN<br>(Ribu Rupiah) | Total Anggaran<br>(Ribu Rupiah) | Kewenangan    |
|-----|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----|------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|
|     |                | Kab. Manggarai           | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                | Kab. Sumba Timur         | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                | Kab. Sumba Barat         | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                | Kab. Lembata             | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | bulan            | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                | Kab. Rote Ndao           | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                | Kab. Manggarai<br>Barat  | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                | Kab. Sumba<br>Tengah     | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                | Kab. Sumba Barat<br>Daya | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 30,000                    | 30,000                          | TP Prop       |
|     |                | Kab. Manggarai<br>Timur  | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | bulan            | 30,000                    | 30,000                          | TP Prop       |
|     |                | Kab. Sabu Raijua         | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | bulan            | 30,000                    | 30,000                          | TP Prop       |
|     |                | Kab. Malaka              | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 30,000                    | 30,000                          | TP Prop       |
|     |                | Kab. Belu                | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 60,000                    | 60,000                          | TP Kab/Kota   |
| 25  | Provinsi Papua | Provinsi Papua           | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 400,700                   | 400,700                         | Dekonsentrasi |
|     |                | Kab. Jayapura            | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 20,000                    | 20,000                          | TP Prop       |
|     |                | Kab. Biak-Numfor         | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                | Kab. Jayawijaya          | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                | Kab. Nabire              | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                | Kab. Mimika              | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                | Kab. Boven Digoel        | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 20,000                    | 20,000                          | TP Prop       |

| NO. | LOKASI                   |                           | OUTPUT                 | KOMPONEN                 | VOL | SATUAN           | ANGGARAN<br>(Ribu Rupiah) | Total Anggaran<br>(Ribu Rupiah) | Kewenangan    |
|-----|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|-----|------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|
|     |                          | Kota Jayapura             | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                          | Kab. Merauke              | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 60,000                    | 60,000                          | TP Kab/Kota   |
|     |                          | Kab. Keerom               | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 60,000                    | 60,000                          | TP Kab/Kota   |
|     |                          | Kab. Lanny Jaya           | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 60,000                    | 60,000                          | TP Kab/Kota   |
| 26  | Provinsi<br>Bengkulu     | Provinsi Bengkulu         | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 488,000                   | 488,000                         | Dekonsentrasi |
|     |                          | Kab. Bengkulu<br>Utara    | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | bulan            | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                          | Kab. Rejang<br>Lebong     | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                          | Kab. Kaur                 | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                          | Kab. Muko-muko            | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                          | Kab. Lebong               | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 20,000                    | 20,000                          | TP Prop       |
|     |                          | Kab. Kepahiang            | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 60,000                    | 60,000                          | TP Kab/Kota   |
| 27  | Provinsi<br>Maluku Utara | Provinsi Maluku<br>Utara  | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 329,000                   | 329,000                         | Dekonsentrasi |
|     |                          | Kab. Halmahera<br>Tengah  | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 20,000                    | 20,000                          | TP Prop       |
|     |                          | Kab. Halmahera<br>Selatan | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                          | Kab. Kepulauan<br>Sula    | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 20,000                    | 20,000                          | TP Prop       |
|     |                          | Kab. Halmahera<br>Timur   | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                          | Kab. Halmahera<br>Barat   | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                          | Kab. Pulau<br>Morotai     | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                          | Kota Ternate              | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |

| NO. | LOKASI                         |                               | OUTPUT                 | KOMPONEN                 | VOL | SATUAN           | ANGGARAN<br>(Ribu Rupiah) | Total Anggaran<br>(Ribu Rupiah) | Kewenangan    |
|-----|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|-----|------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|
|     |                                | Kota Tidore<br>Kepulauan      | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
| 28  | Provinsi<br>Banten             | Provinsi Banten               | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 575,400                   | 575,400                         | Dekonsentrasi |
|     |                                | Kab. Serang                   | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                | Kab. Pandeglang               | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                | Kab. Lebak                    | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                | Kab. Tangerang                | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
| 29  | Provinsi<br>Bangka<br>Belitung | Provinsi Bangka<br>Belitung   | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 287,990                   | 287,990                         | Dekonsentrasi |
|     |                                | Kab. Belitung                 | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                | Kab. Bangka                   | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 20,000                    | 20,000                          | TP Prop       |
|     |                                | Kab. Bangka<br>Tengah         | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
| 30  | Provinsi<br>Gorontalo          | Provinsi Gorontalo            | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 335,000                   | 335,000                         | Dekonsentrasi |
|     |                                | Kab. Gorontalo                | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                | Kab. Boalemo                  | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                | Kab. Pohuwato                 | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                | Kab. Bone<br>Bolango          | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                | Kab. Gorontalo<br>Utara       | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                | Kota Gorontalo                | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
| 31  | Provinsi<br>Kepulauan<br>Riau  | Provinsi<br>Kepulauan<br>Riau | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 302,000                   | 302,000                         | Dekonsentrasi |

| NO. | LOKASI                              |                                  | OUTPUT                 | KOMPONEN                 | VOL | SATUAN           | ANGGARAN<br>(Ribu Rupiah) | Total Anggaran<br>(Ribu Rupiah) | Kewenangan    |
|-----|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|-----|------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|
|     |                                     | Kab. Bintan                      | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                     | Kab. Karimun                     | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                     | Kab. Natuna                      | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                     | Kab. Lingga                      | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                     | Kab. Anambas                     | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                     | Kota Batam                       | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
| 32  | Provinsi Papua<br>Barat             | Provinsi Papua<br>Barat          | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 554,000                   | 554,000                         | Dekonsentrasi |
|     |                                     | Kab. Manokwari                   | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                     | Kab. Fak Fak                     | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                     | Kab. Sorong<br>Selatan           | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                     | Kab. Raja Ampat                  | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                     | Kab. Teluk Bintuni               | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                     | Kab. Teluk<br>Wondama            | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 20,000                    | 20,000                          | TP Prop       |
|     |                                     | Kab. Tambrauw                    | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                     | Kab. Pegunungan<br>Arfak         | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 20,000                    | 20,000                          | TP Prop       |
|     |                                     | Kab. Manokwari<br>Selatan        | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                     | Kota Sorong                      | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                     | Kab. Sorong                      | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 60,000                    | 60,000                          | TP Kab/Kota   |
| 33  | Provinsi Prop.<br>Sulawesi<br>Barat | Provinsi Prop.<br>Sulawesi Barat | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 305,000                   | 305,000                         | Dekonsentrasi |

| NO. | LOKASI                          |                                 | OUTPUT                 | KOMPONEN                 | VOL | SATUAN           | ANGGARAN<br>(Ribu Rupiah) | Total Anggaran<br>(Ribu Rupiah) | Kewenangan    |
|-----|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|-----|------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|
|     |                                 | Kab. Mamuju                     | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                 | Kab. Mamuju<br>Utara            | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                 | Kab. Polewali<br>Mandar         | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                 | Kab. Mamasa                     | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                 | Kab. Mamuju<br>Tengah           | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                 | Kab. Majene                     | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 60,000                    | 60,000                          | TP Kab/Kota   |
| 34  | Provinsi<br>Kalimantan<br>Utara | Provinsi<br>Kalimantan<br>Utara | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 213,395                   | 213,395                         | Dekonsentrasi |
|     |                                 | Kota Tarakan                    | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 35,000                    | 35,000                          | TP Prop       |
|     |                                 | Kab. Bulungan                   | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 60,000                    | 60,000                          | TP Kab/Kota   |
|     |                                 | Kab. Nunukan                    | Layanan<br>Perkantoran | Administrasi<br>Kegiatan | 12  | Bulan<br>Layanan | 60,000                    | 60,000                          | TP Kab/Kota   |
|     | TOTAL ANGGARAN (Rp)             |                                 |                        |                          |     |                  | 77,242,190                | 77,242,190                      |               |

**Layanan Internal (Overhead)  
(1774.951)**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Reformasi Birokrasi memerlukan dukungan kemajuan teknologi dalam rangka mempermudah arus informasi dalam segala bidang dan juga ketersediaan sarana fisik atau infrastruktur. Salah satu usaha untuk mewujudkan kinerja yang baik pada pemerintahan termasuk di dalam bidang hortikultura, maka diperlukan peningkatan kemampuan pegawai di lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura. Penguasaan disektor teknologi informasi diperlukan untuk menunjang kinerja dari Direktorat Jenderal Hortikultura, sehingga salah satu caranya adalah dengan tersedianya fasilitas pengelola.

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Hortikultura untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia hortikultura diperlukan peralatan dan fasilitas perkantoran yang memadai. Peralatan dan fasilitas perkantoran adalah salah satu sarana penunjang yang diberikan negara bagi pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura untuk mendukung kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi, dapat meningkatkan produktivitas karyawan sehingga dapat membentuk tenaga kerja yang produktif, terampil, dan professional yang bekerja secara efektif dan efisien. Penyediaan peralatan dan fasilitas kantor sangat diperlukan dalam membina prosedur dan tata kerja perkantoran, mempermudah pekerjaan, menghemat waktu, tenaga dan pikiran manusia dalam melakukan tugas-tugas rutin dan insidentil.

Pemeliharaan/ Perawatan gedung kantor termasuk merupakan salah satu yang perlu mendapat perhatian sebagai upaya dalam meningkatkan kinerja SDM hortikultura. Cakupan perawatan gedung/ bangunan diantaranya adalah usaha untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi agar bangunan dapat berfungsi dengan baik. Kegiatan memperbaiki dan/ atau mengganti bagian bangunan gedung, kompenen, bahan bangunan, dan/ atau sarana prasarana agar bangunan gedung tetap layak fungsi. Ruang atau aset bangunan Direktorat Jenderal Hortikultura belum termanfaatkan secara optimal untuk kenyamanan, keamanan, peningkatan kinerja dan

penyediaan fasilitas bagi pegawai. Dengan demikian, diharapkan kinerja pembangunan hortikultura dapat meningkat seiring dengan perawatan gedung yang optimal dan layak fungsi.

Dengan tersedianya fasilitas tersebut maka diharapkan pelayanan kepada masyarakat akan lebih baik dan kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura akan meningkat.

## **B. TUJUAN DAN SASARAN**

### **TUJUAN**

1. Untuk memberikan petunjuk dan acuan pemanfaatan dana untuk pemenuhan layanan internal (*overhead*) Direktorat Jenderal Hortikultura.
2. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan gedung/bangunan kantor agar tetap layak fungsi.
3. Untuk mendukung penyelesaian tugas yang berkaitan dengan pekerjaan kantor secara efisien dan efektif

### **SASARAN**

1. Untuk penguasaan teknologi sehingga terjadi peningkatan kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

## BAB II PELAKSANAAN

### A. PELAKSANAAN DI PUSAT

1. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan di Direktorat Jenderal Hortikultura.

2. Sub Output/ Komponen Kegiatan/ Sub Komponen Kegiatan/ Detail Kegiatan

Output : (951) Layanan Internal (*Overhead*)

Komponen : (052) Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

(053) Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

(054) Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura. Penerima manfaat adalah karyawan lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura.

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada DIPA Satker Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018.

5. Metode

Kegiatan layanan internal (*overhead*) adalah sebagai berikut

(052) Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Perangkat Pengolah Data dan informasi diperlukan untuk menunjang kinerja pegawai yang akan menjadi aset Direktorat Jenderal Hortikultura.

Pelaksanaan pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi dilakukan dengan mengacu kepada tata cara pengadaan barang dan jasa yang berlaku.

Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dilakukan dengan akun Belanja (532111) Modal Peralatan dan Mesin.

(053) Pelaksanaan Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Perangkat Peralatan dan Fasilitas Perkantoran diperlukan untuk menunjang kinerja pegawai yang akan menjadi aset Direktorat Jenderal Hortikultura

Pelaksanaan pengadaan perangkat peralatan dan fasilitas perkantoran dilakukan dengan mengacu kepada tata cara pengadaan barang dan jasa yang berlaku.

Pelaksanaan Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran dilakukan akun Belanja (532111) Modal Peralatan dan Mesin

(054) Pelaksanaan Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan.

Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan diperlukan untuk mempermudah pegawai dalam mengerjakan tugasnya setiap hari yang akan menjadi aset Direktorat Jenderal Hortikultura.

Pelaksanaan pengadaan perangkat peralatan dan fasilitas perkantoran dilakukan dengan mengacu kepada tata cara pengadaan barang dan jasa yang berlaku.

Pelaksanaan Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan dilakukan dengan akun Belanja (533111) Modal Gedung dan Bangunan.

## **BAB III**

### **INDIKATOR KINERJA**

#### **A. MASUKAN/ INPUT**

1. Dana Rp. 3.600.660.000,-
2. SDM Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura
3. Petunjuk Teknis Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018.

#### **B. KELUARAN/ OUTPUT**

1. Tersedianya 74 (tujuh puluh empat) unit perangkat pengolah data dan komunikasi
2. Terasfasilitasinya rehabilitasi gedung/ bangunan seluas 2.250 m<sup>2</sup>
3. Tersedianya peralatan dan fasilitas perkantoran sebanyak 30 unit.

#### **C. HASIL/ OUTCOME**

1. Meningkatnya kinerja pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya
2. Penyelesaian pekerjaan kantor yang lebih efektif dan efisien
3. Terciptanya kenyamanan, keamanan, dan tersedianya fasilitas gedung/ bangunan yang layak fungsi.

#### **D. MANFAAT/ BENEFIT**

1. Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Hortikultura terlaksana dengan seutuhnya.
2. Meningkatnya kinerja sumber daya manusia hortikultura

#### **E. DAMPAK/ IMPACT**

Terbangunnya kinerja pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura yang positif, maju, dan berdedikasi

## LAMPIRAN 2. LOKASI OUTPUT LAYANAN INTERNAL (1774.951)

| No | Lokasi | Output                      | Komponen                                         | Volume | Satuan | Anggaran      |
|----|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------|---------------|
|    |        |                             |                                                  |        |        | (Rupiah)      |
| 1  | Pusat  | Layanan internal (overhead) | Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi | 74     | Unit   | 950.660.000   |
|    |        |                             | Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran    | 30     | Unit   | 150.000.000   |
|    |        |                             | Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan     | 2.250  | M2     | 2.500.000.000 |